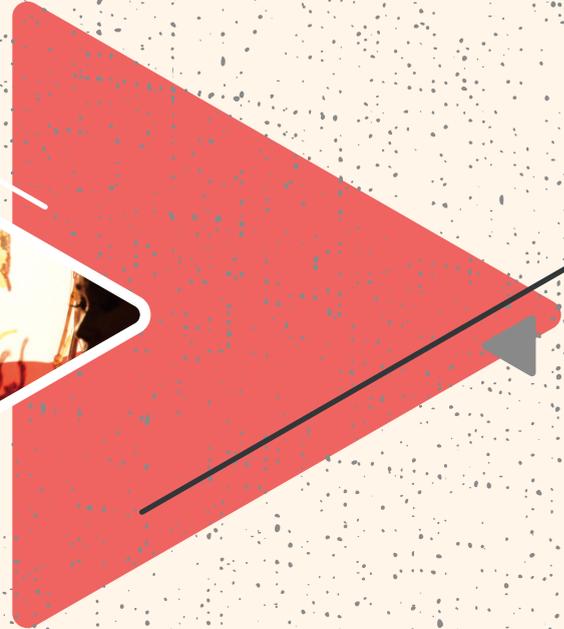


Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



PERFORMANCE REPORT

20
19



PERFORMANCE REPORT 20 19





Kata Pengantar

Performance Report atau Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini disusun berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun 2019 merupakan tahun kedua implementasi RPJMD DIY Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Pemda DIY kepada publik yang didalamnya memuat pencapaian sasaran pembangunan daerah beserta tolok ukur kinerjanya yang didasarkan pada hasil pengukuran dan analisis yang mengedepankan aspek akuntabilitas kinerja.

Sasaran pembangunan daerah merupakan terjemahan dari visi pembangunan DIY lima tahun ke depan yaitu "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja". Sasaran pembangunan daerah merupakan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Terdapat 8 sasaran sebagaimana dimuat dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022, yaitu: meningkatnya derajat kualitas SDM; meningkatnya derajat ekonomi masyarakat; terpelihara dan berkembangnya kebudayaan; meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan; menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah; meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan; meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan; dan meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa. Pencapaian sasaran kinerja merupakan janji kepada publik bahwa pelaksanaan pembangunan daerah harus memiliki hasil terhadap penyelesaian problematika daerah.

Laporan ini memberikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan di DIY sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan secara berkesinambungan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat. Kami senantiasa menerima masukan yang bersifat konstruktif untuk meningkatkan kualitas di berbagai aspek pembangunan.

Yogyakarta, Maret 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X







Daftar Isi



i	KATA PENGANTAR
iii	DAFTAR ISI
1	TENTANG JOGJA
5	SEPENGAL PERJALANAN MASA LALU
9	KEBUDAYAAN SEBAGAI PILAR MEMBANGUN PERADABAN
11	VISION DRIVEN ORGANIZATION
13	PENGENDALIAN KINERJA BERKUALITAS
17	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
23	POTRET KINERJA DAERAH
49	AKUNTABILITAS KEUANGAN
51	CAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG'S)
53	SENTUHAN INOVASI DAERAH
63	PENUTUP

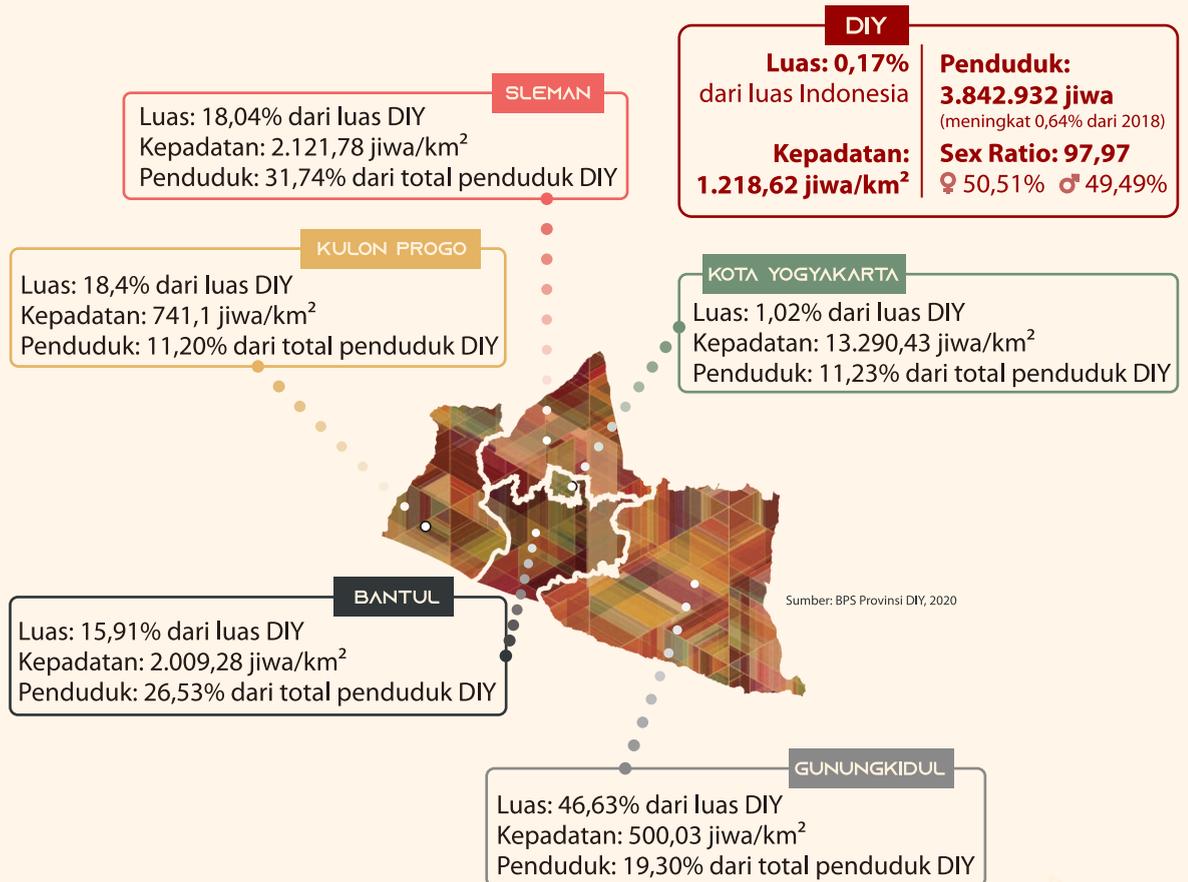


Tentang Jajaja





Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu dari 34 provinsi di Indonesia dan terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Posisi DIY berada antara 7°33'- 8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Secara geografis, DIY berbatasan dengan Laut Indonesia di bagian selatan, sedangkan di bagian Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, sebelah Timur Laut dengan Kabupaten Klaten, sebelah Barat Laut dengan Kabupaten Magelang, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Secara administratif, DIY terdiri dari empat kabupaten dan satu kota yang terbagi atas 78 kecamatan serta 392 desa dan 46 kelurahan.



KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 sebanyak 2.203.920 orang, naik 0,56% dari tahun 2018 yang berjumlah 2.191.742 orang.



PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian DIY tumbuh dengan tren meningkat sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 6,60%.

Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2019 sebesar 6,60% mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 6,20%. Nilai PDRB atas harga dasar berlaku tercatat sebesar Rp141,4 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp104,5 triliun. Lapangan usaha



dengan pertumbuhan tertinggi adalah konstruksi sebesar 14,39%, diikuti oleh pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang yang tumbuh sebesar 8,90% serta penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 8,89%. Lapangan usaha konstruksi memberi andil terbesar pertumbuhan ekonomi DIY selama 2019, yaitu sebesar 1,47% diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,85% serta informasi dan komunikasi sebesar 0,83%. Andil besar lapangan konstruksi tersebut



disebabkan aktivitas lapangan usaha konstruksi yang masih berlanjut pada penyelesaian proyek bandara dan infrastruktur penunjangnya serta proyek pembangunan underpass jalur lintas selatan di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dan *underpass* Kentungan.

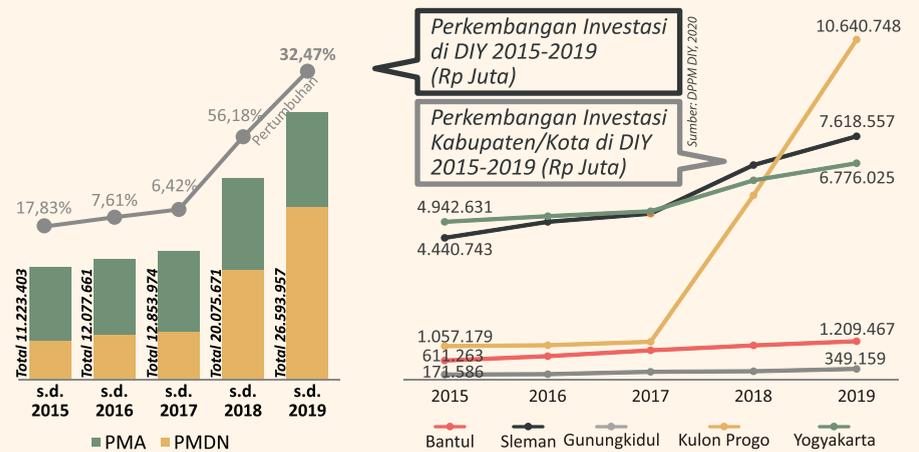
Dari sisi pengeluaran, penyokong utama pertumbuhan adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 9,74% diikuti komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR) dengan nilai pertumbuhan sebesar 9,58% serta konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan 3,81%. Hal ini menunjukkan adanya penambahan belanja modal cukup besar sehingga diharapkan dapat menggerakkan sendi ekonomi lain untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

PENDAPATAN PER KAPITA

PDRB ADHB per kapita di DIY selama tahun 2015-2019 senantiasa menunjukkan peningkatan. PDRB ADHB per kapita tahun 2019 sebesar 36,79 juta rupiah (angka sementara) mengalami peningkatan 2,64 juta rupiah dari 34,15 juta rupiah pada tahun 2018. Kenaikan pendapatan per kapita disebabkan oleh tingginya laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2019.

INVESTASI

Secara umum, perkembangan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24% per tahun. Pada tahun 2019 investasi di DIY tumbuh sebesar 32,47%. Nilai investasi di DIY pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp26.593.957,00 juta, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp20.075.671,00 juta atau meningkat sebesar Rp6.518.285,00 juta.



Sektor **infrastruktur** yang merupakan belanja pemerintah masih mendominasi realisasi investasi di PMDN di DIY disusul oleh sektor perhotelan dan restoran serta sektor industri tekstil. Sementara realisasi investasi PMA tertinggi pada sektor **perdagangan** dan **reparasi** yang disusul oleh sektor transportasi, gudang dan komunikasi, serta sektor perhotelan dan restoran.



Sempurna Perjalanan Masa Lalu





Kasultanan Ngayogyakarta sebagai cikal bakal DIY, secara substansial diakui keberadaannya pada tanggal 13 Februari 1755 dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti.

Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai pendahulu DIY memiliki status sebagai kerajaan vasal atau negara bagian (*dependent state*) selama dalam pemerintahan penjajahan, VOC, Hindia Belanda, dan Jepang. Status tersebut disebut sebagai *zelfbesturende landschappen* pada masa Belanda dan *Kooti* atau *Koti* pada masa Jepang. Status ini pula yang kemudian diberi payung hukum oleh Presiden Soekarno pada sidang BPUPKI dan PPKI.

Setelah Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, Sultan HB IX mengirim telegram kepada kedua proklamator dan ketua BPUPKI berisi ucapan selamat atas terbangunnya Negara Republik Indonesia dan menyatakan sanggup berdiri di belakang pimpinannya. Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengeluarkan dekrit yang terkenal dengan Amanat 5 September 1945, isi dekrit yaitu terintegrasinya monarki Yogyakarta dan Pakualaman ke dalam Republik Indonesia. Sebagai respon atas dekrit tersebut, pada tanggal 6 September 1945 Presiden Republik Indonesia menyampaikan 'Piagam Penetapan' yang mengandung makna kepercayaan Republik Indonesia kepada Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai pendukung cita-cita Republik Indonesia.

Integrasi ke dalam RI tersebut diikuti dengan perumusan RUU Pokok Pemerintahan Yogyakarta sampai awal tahun 1946. Pada tanggal 18 Mei 1946, Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam mengeluarkan maklumat Nomor 18 yang mengatur kekuasaan legislatif dan eksekutif, dan nama DIY secara resmi digunakan untuk menandai bersatunya dua monarki. Pembentukan DIY ditetapkan dengan UU No. 3 Tahun 1950. Secara jelas DIY disebut sebagai daerah istimewa setingkat provinsi dan bukan provinsi. Konsekuensi hukum dan politik berbeda dengan provinsi, terutama dalam hal nama kepala daerah dan wakil kepala daerah. UU No. 3 Tahun 1950 kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 1950 yang berisi penambahan kewenangan bagi DIY. Pengaturan keistimewaan Daerah Istimewa dan pemerintahannya selanjutnya diatur dengan UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.



Peneguhan keistimewaan DIY telah melalui proses panjang. Perjuangan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan status keistimewaan ditegaskan pada 10 Mei 2012 dengan dikeluarkannya Dekrit Kerajaan Sabdatama oleh Sri Sultan HB X dan Adipati Paku Alam IX. Puncak perjuangan status keistimewaan adalah ditetapkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam UU tersebut keistimewaan diartikan sebagai keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa, yaitu wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan tersebut mencakup: (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) kelembagaan Pemda DIY; (c) kebudayaan; (d) pertanahan; dan (e) tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2012 didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan kemudian diatur dengan beberapa Peraturan Daerah Istimewa DIY, yaitu:

1. Perdais DIY No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diubah dengan Perdais DIY No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2013;
2. Perdais DIY No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Perdais DIY No. 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Perdais DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
5. Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
6. Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
7. Perdais DIY No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi semangat keistimewaan disusun dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022 dengan tema Abad Samudera Hindia. Visi pembangunan DIY yang



diusung selama lima tahun dalam RPJMD DIY 2017-2022 adalah Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Adapun misi untuk mencapai visi tersebut, yaitu: (1) Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban; dan (2) Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Segenap pemangku kepentingan DIY perlu memanfaatkan momentum Abad Samudera Hindia untuk mendayagunakan potensi kelautan di kawasan selatan DIY dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga serta penanggulangan kemiskinan. Kesenjangan yang relatif tinggi antara kabupaten di wilayah selatan dengan kabupaten di wilayah utara melatarbelakangi pentingnya memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan wilayah selatan.

Pemda DIY terus melakukan penataan, baik dalam perspektif reformasi birokrasi maupun pembangunan daerah dengan melakukan terobosan terutama dalam mengimplementasikan paradigma *among tani dagang layar* yang berarti bahwa kawasan selatan menjadi halaman depan. Potensi kelautan di wilayah selatan dioptimalkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui sektor pariwisata, sektor dagang, ataupun sektor pertanian. Untuk membangun wilayah selatan, Pemda DIY telah menyiapkan infrastruktur pendukung seperti Jalur Jalan Lintas Selatan, Pelabuhan Tanjung Adikarto, dan rencana pembangunan kawasan aerotropolis Bandara Internasional Yogyakarta.



Kebudayaan Sebagai Pilar Membangun Peradaban





Indonesia sebagai bangsa dengan beragam corak latar belakang (suku, ras, bahasa, dsb) memiliki khazanah budaya yang sangat kaya dan melimpah. Khazanah budaya tersebut selain menunjukkan peradaban sebuah bangsa, juga merupakan modal dasar pembangunan. Internalisasi nilai-nilai luhur budaya yang didapatkan melalui hasil pemahaman mendalam terhadap karya budaya baik benda (*tangible*) maupun takbenda (*intangible*) akan memperteguh karakter dan jatidiri suatu bangsa sebagai modal utama dalam mendorong kemajuan bangsa, meningkatkan produktivitas, dan lebih tahan terhadap guncangan zaman. Sehingga dalam konteks pembangunan, tidak hanya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara materi semata tetapi juga memperhatikan keselarasan alam dan lingkungan, serta pembangunan manusia itu sendiri dalam rangka membentuk manusia bermental tangguh dan memiliki kesadaran budaya.

Di level nasional, kinerja pembangunan kebudayaan DIY diapresiasi sebagai provinsi dengan kinerja pembangunan kebudayaan terbaik. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2018 menunjukkan angka 73,79 dari dari tujuh dimensi kebudayaan yang diukur, yaitu: 1) Dimensi Ekonomi Budaya, 2) Dimensi Pendidikan, 3) Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, 4) Dimensi Warisan Budaya, 5) Dimensi Ekspresi Budaya, 6) Dimensi Budaya Literasi, dan 7) Dimensi Kesetaraan Gender.

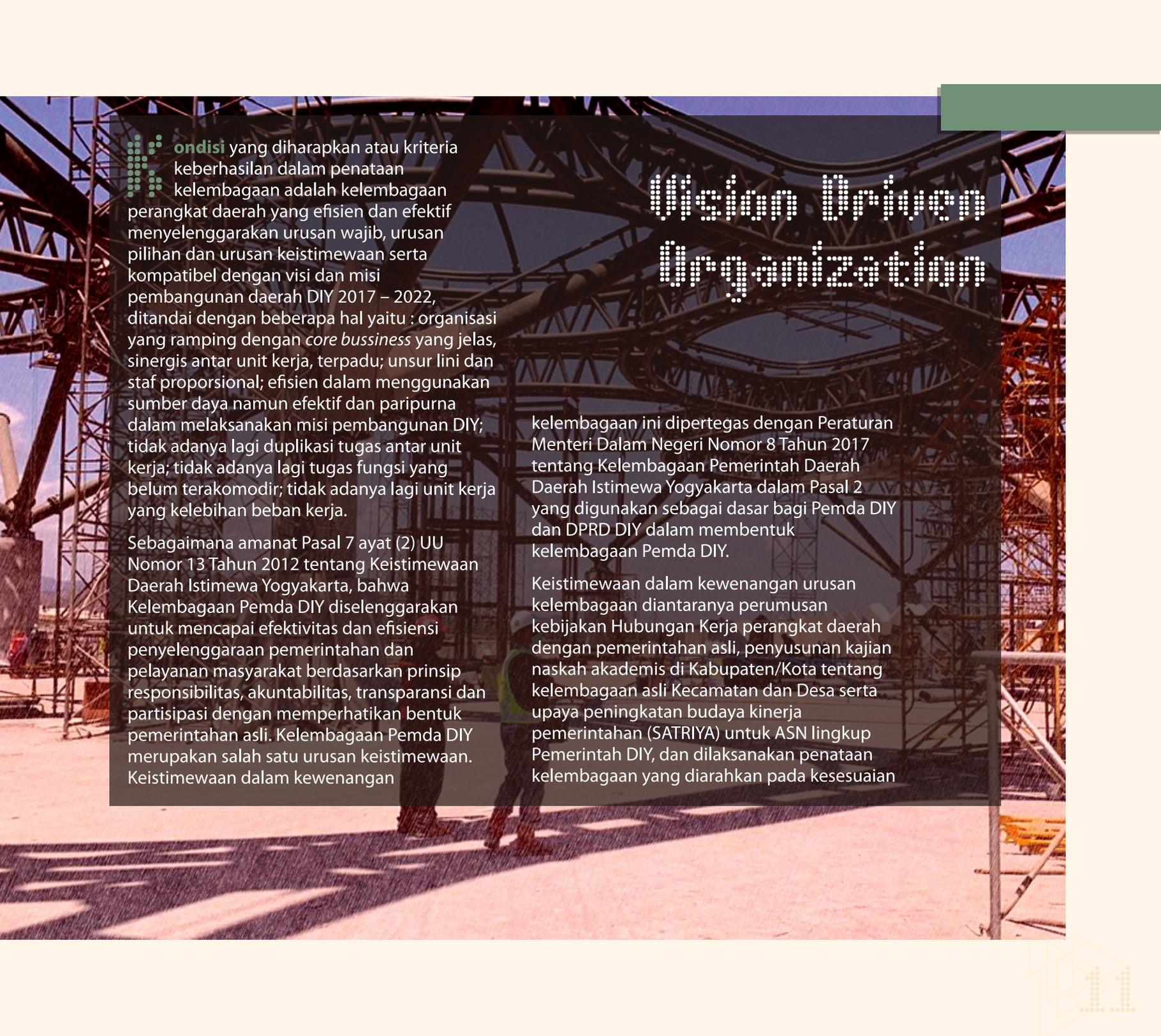


Capaian IPK DIY menunjukkan bahwa DIY masih mampu menunjukkan keaslian budaya leluhur yang tercermin dari tingginya nilai-nilai budaya yang mendukung capaian pembangunan kebudayaan tersebut.

Capaian tersebut sejalan dengan spirit pembangunan DIY dimana kebudayaan menjadi payung sekaligus arusutamanya. Nilai-nilai adiluhung seperti *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Mangasah Mingising Budi*, *Memasuh Malaning Bumi*, *Golong Gilig*, serta sifat-sifat *satriya* yang berpegang pada etos *Sawiji*, *Greget*, *Sengguh*, *Ora Mingkuh* menjadi pijakan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Nilai-nilai tersebut menjadi spirit dalam peningkatan harkat dan martabat masyarakat DIY yang ditandai dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan. Kebudayaan sebagai bagian strategi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di DIY seperti kemiskinan. Sikap mental yang tangguh, malu bila mengaku miskin, dan gotong-royong yang ditopang oleh pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan memperhatikan keselarasan alam dan lingkungan diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY.

Dalam upaya peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja, diperlukan sinergitas dan komitmen antar *stakeholder*. Di sisi pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang mengutamakan prinsip *good governance* dan ditopang dengan SDM aparatur yang memahami nilai budaya kerja (etos dan etika) serta berorientasi pada kualitas layanan menjadi hal yang mutlak untuk dipenuhi. Internalisasi nilai-nilai budaya dalam pelayanan pemerintahan akan menciptakan SDM aparatur yang responsif, dan berintegritas, sehingga kerja pemerintahan tidak lagi berorientasi pada kinerja proyek yang berbasis penyerapan anggaran tetapi lebih pada orientasi pada kualitas hasil dan manfaat bagi masyarakat dari pelayanan yang diberikan.





ondisi yang diharapkan atau kriteria keberhasilan dalam penataan kelembagaan adalah kelembagaan perangkat daerah yang efisien dan efektif menyelenggarakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan serta kompatibel dengan visi dan misi pembangunan daerah DIY 2017 – 2022, ditandai dengan beberapa hal yaitu : organisasi yang ramping dengan *core bussiness* yang jelas, sinergis antar unit kerja, terpadu; unsur lini dan staf proporsional; efisien dalam menggunakan sumber daya namun efektif dan paripurna dalam melaksanakan misi pembangunan DIY; tidak adanya lagi duplikasi tugas antar unit kerja; tidak adanya lagi tugas fungsi yang belum terakomodir; tidak adanya lagi unit kerja yang kelebihan beban kerja.

Sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Kelembagaan Pemda DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk pemerintahan asli. Kelembagaan Pemda DIY merupakan salah satu urusan keistimewaan. Keistimewaan dalam kewenangan

Mision Driven Organization

kelembagaan ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pasal 2 yang digunakan sebagai dasar bagi Pemda DIY dan DPRD DIY dalam membentuk kelembagaan Pemda DIY.

Keistimewaan dalam kewenangan urusan kelembagaan diantaranya perumusan kebijakan Hubungan Kerja perangkat daerah dengan pemerintahan asli, penyusunan kajian naskah akademis di Kabupaten/Kota tentang kelembagaan asli Kecamatan dan Desa serta upaya peningkatan budaya kinerja pemerintahan (SATRIYA) untuk ASN lingkup Pemerintah DIY, dan dilaksanakan penataan kelembagaan yang diarahkan pada kesesuaian





tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Perdais Nomor 1 tahun 2013 yang telah diubah dengan Perdais Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan kajian kinerja pembangunan. Kelembagaan Pemda DIY semula diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2015 dan kemudian disempurnakan lagi dengan Perda Istimewa No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY.

Penataan kelembagaan yang dilakukan oleh Pemda DIY didasarkan pada visi misi yang akan dicapai dalam dokumen perencanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Perangkat daerah beserta dengan strukturnya ditentukan oleh cascade kinerja yang akan diwujudkan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Dengan adanya penataan kelembagaan yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2018, kelembagaan di DIY dapat di efektifkan dan dirampingkan menjadi: (a) dari 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 37 OPD; (b) dari 52 Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi 49 UPT; dan (c) ditambah dengan 127 Sekolah. Sementara dari jumlah struktur eselon yang ada di Pemda DIY, bisa diperbandingkan antara jumlah eselon berdasarkan Perdais 3 Tahun 2015 dengan Perdais 1/2018 dimana : (a) Eselon IIa, dari 32 orang menjadi 33 orang; (b) Eselon IIb, dari 9 orang menjadi 10 orang; (c) Eselon IIIa, dari 230 orang menjadi 204 orang; (d) Eselon IIIb, dari semula tidak ada menjadi 4 orang; (e) Eselon IVa, dari 740 orang menjadi 510 orang; dan (f) Eselon IVb, dari semula tidak ada menjadi 111 orang.





Pengendalian berkualitas merupakan skema pengendalian yang tidak sekedar berfokus pada capaian output belaka, tetapi proses pencapaian output harus dilakukan dengan benar dan kualitas output yang dihasilkan memiliki daya ungkit terhadap pencapaian program hingga impact. Untuk itulah, pola penilaian kinerja kegiatan instansi bergeser dengan mengadopsi konsep *Balanced Score Card* (BSC) dalam rangka menghasilkan output yang berkualitas. BSC diadopsi menjadi skema pengendalian berkualitas, dengan pertimbangan bahwa diperlukan rekayasa sistem manajemen strategik yang berorientasi pada hasil melalui penetapan rangkaian aktifitas sebagai sebuah strategi dan mengendalikan kinerja strategi tersebut untuk mencapai tujuan.

Tahun 2019 adalah tahun pertama dalam melaksanakan skema BSC dalam rangkaian pengendalian yang berkualitas, untuk menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan harus berorientasi pada hasil. Hasil yang merupakan cerminan penyelesaian permasalahan daerah sebagaimana tuntutan publik, menjadi prioritas penanganan yang harus dipecahkan solusinya secara bersama-sama. Secara lebih teknis, pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat dinilai secara lebih terukur, sehingga makna kualitas

Pengendalian Kinerja Berkualitas

dari suatu output yang dihasilkan benar-benar dapat diukur, baik dari perspektif perencanaan, pelaksanaannya, hingga evaluasi terhadap pencapaian hasil. Itulah perlunya skema pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas, yakni upaya strategis yang mendorong pencapaian *output* secara berkualitas dengan mendorong ketercapaian *outcome* hingga *impact*.

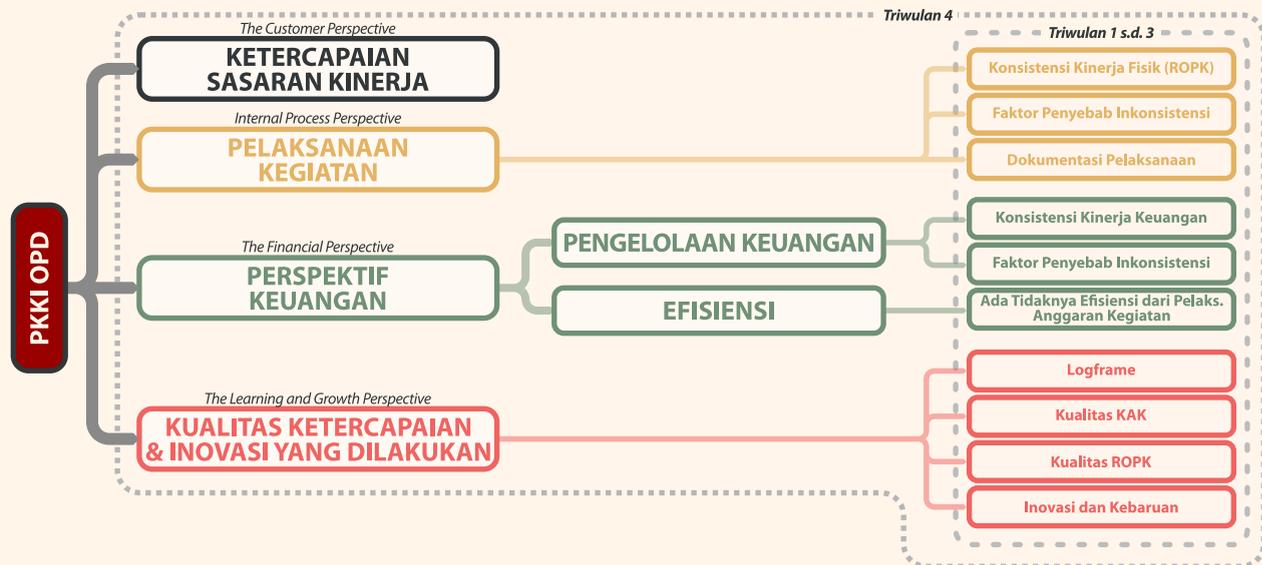
Implikasi sebagai sebuah lembaga publik, pemerintah daerah menerapkan skema pengendalian berkualitas berdasarkan konsep BSC yang disesuaikan, melalui pendekatan empat pilar, yakni: (1) *Customer Perspective*, (2) *Internal Process Perspective*, (3) *Financial Perspective*, dan (4) *Learning and Growth Perspective*. Keempat pilar tersebut memiliki



bobot yang berbeda, tetapi semuanya berpengaruh terhadap metodologi pengendalian pembangunan daerah, terutama dalam hal teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan dan memonitor capaian-capaiannya secara berjenjang. Dari keempat pilar BSC tersebut, dalam perspektif Pemda DIY, pilar *Customer Perspective* memiliki bobot yang paling besar dibandingkan ketiga pilar lainnya. Artinya, orientasi pelaksanaan harus fokus pada pencapaian hasil atau kualitas layanan, yang tercermin dari sasaran pemda, sasaran program pemda, sasaran organisasi perangkat daerah maupun sasaran program.

Keempat pilar itu akan terintegrasi dalam sistem pengendalian berbasis IT yang saat ini dikenal dengan SENGGUH, yakni Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah. Pengendalian melalui aplikasi SENGGUH berbasis IT dilakukan kepada seluruh OPD untuk memastikan keberlangsungan kegiatan bisa berjalan sesuai rencana dan hasilnya dapat diukur secara berkelanjutan. Secara lebih operasional, pengendalian rutin setiap triwulanan akan terus dijalankan dengan penambahan beberapa aspek yang mengacu pada konsep BSC yang sudah disesuaikan. Konsekuensinya, penilaian kinerja kegiatan berbasis BSC akan menjadi aktivitas rutin setiap bulan maupun triwulanan untuk mengetahui kinerja instansi secara terukur, yang memungkinkan digunakan sebagai salah satu basis penilaian kinerja lainnya: seperti pemberian *reward*, tunjangan kinerja, capaian progres, hingga tambahan penghasilan.



Customer Perspective, atau ketercapaian sasaran kinerja merupakan aspek atau pilar BSC yang memiliki bobot terbesar dalam penilaian kinerja instansi. Besarnya bobot ini dilatarbelakangi bahwa orientasi pelaksanaan kegiatan harus mampu mendukung pencapaian sasaran instansi maupun sasaran program. Sebaik apapun pelaksanaan kegiatannya, tetapi apabila tidak berkorelasi terhadap capaian hasil maka kegiatan itu bisa dipastikan tidak memiliki kualitas dalam mendukung pencapaian hasil. Artinya, *output* kegiatan yang dihasilkan harus mendorong pencapaian sasaran daerah dan perbaikan kualitas layanan publik.

Internal Process Perspective atau dikenal sebagai pilar pelaksanaan kegiatan, yakni bagian dari pengendalian yang dilakukan berdasarkan perspektif pelaksanaan kinerja fisik kegiatan. Potret kinerja pada aspek ini bisa diwujudkan secara operasional melalui kinerja fisik kegiatan berdasarkan rencana operasional pelaksanaan kegiatan (ROPK), faktor pembentuk konsistensi kinerja fisik kegiatan, dan ketersediaan bukti pendukung yang dapat diverifikasi.

Financial Perspective, atau perspektif keuangan merupakan pilar ketiga dari konsep BSC yang ditunjukkan melalui konsistensi kinerja pertanggungjawaban keuangan dan efisiensi. Faktor efisiensi dalam bagian pilar ini menjadi penting dengan pertimbangan bahwa

pelaksanaan kegiatan tidak dimaknai dengan semangat eksploitasi anggaran. Artinya, *output* kegiatan yang dicapai secara optimal akan diberikan apresiasi apabila terdapat sisa anggaran atau alokasi sumberdaya anggaran tidak dihabiskan. Ketepatan pertanggungjawaban keuangan yang disertai faktor pendukungnya dan besaran nilai efisiensi adalah kunci pada pilar ini.

Learning and Growth Perspective, atau dimaknai sebagai kualitas perencanaan dan inovasi yang dilakukan, merupakan pilar keempat yang diukur untuk mengetahui kualitas kegiatan yang dilakukan. Kualitas kegiatan yang dilakukan akan tercermin pada konsistensi perencanaan dan pelaksanaan. Konsistensi itu tercermin pada *logical framework (logframe)* yang disusun, kualitas kerangka acuan kegiatan (KAK) yang diusulkan, keterincian Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) yang dibuat, dan ada tidaknya inovasi atau kebaruan pada level kegiatan. Adapun, penjelasan singkat terhadap empat unsur pendukung pilar kualitas perencanaan dan inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

- *Logical framework (logframe)* adalah keterkaitan antara program dalam mendukung capaian sasaran instansi dan komponen kegiatan yang mendukungnya. Keterkaitan program dalam mendukung indikator sasaran

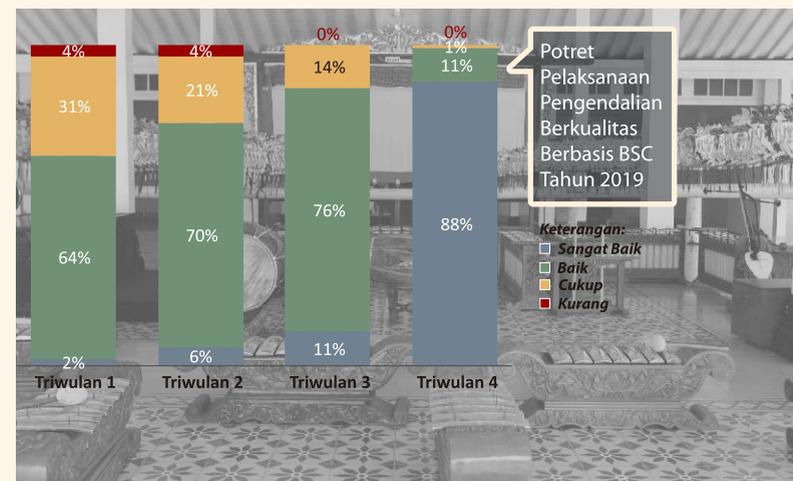


instansi harus dapat diketahui benang merahnya, sekaligus mengetahui kontribusi kegiatan yang menyokong keberhasilan capaian program tersebut harus dipahami secara berjenjang.

- KAK merupakan penjelasan komprehensif terhadap suatu kegiatan yang akan menghasilkan sejumlah output. Latar belakang, tujuan, ragam output, hingga dimensi penerima manfaat dan waktu pelaksanaan; merupakan beberapa aspek yang harus bisa tergambarkan dalam KAK. KAK penting diketahui saat pengusulan kegiatan dan konsistensinya perlu diketahui saat pelaksanaan agar kualitas outputnya bisa diketahui kemanfaatannya.
- Keterincian ROPK, menjadi penting untuk dinilai dalam rangka memahami proses pencapaian output dalam koridor pelaksanaan kegiatan. ROPK yang rinci dengan tervisualisasikan melalui serangkaian aktifitas dalam menghasilkan sub-output untuk mencapai output, adalah embrio pada penilaian kinerja individu yang bisa diukur efektifitasnya.
- Untuk inovasi atau kebaruan, merupakan upaya baru atau mengadopsi terhadap hal-hal baru dari luar untuk diterapkan pada pelaksanaan kegiatan sehingga output yang dihasilkan bisa berkualitas

secara efektif atau efisien. Inovasi yang memiliki nilai optimal adalah perbaikan aktifitas dengan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan publik atau berdampak baik hingga pihak eksternal, daripada inovasi yang sekedar dilakukan untuk perbaikan sistem internal. Inovasi ini merupakan tools poin penilaian yang penting, sebagai embrio yang harus dipupuk untuk melakukan perbaikan dan responsif terhadap dinamika perubahan.

Adapun capaian penerapan skema pengendalian berkualitas yang mengadopsi konsep BSC pada 2019 dapat dilihat dari kinerja triwulan 1 hingga triwulan 4, yang senantiasa mengalami perbaikan. Apabila pada triwulan 1 hingga triwulan 2, terdapat kinerja yang masuk klasifikasi kurang, maka pada triwulan 4 sudah tidak terdapat kinerja yang masuk pada klasifikasi kurang, melainkan sebagian besar masuk pada kategori sangat baik. Demikian halnya pada capaian sasaran pemda, menunjukkan adanya penurunan gap dari 43% pada 2018 menjadi 35% pada tahun 2019. Artinya, sasaran pemda yang tidak tercapai semakin berkurang, terutama terhadap pencapaian: kemiskinan, indeks gini, indeks Williamson, IPG, dan IPM.



 **uberneru DIY** dalam paparan tanggal 2 Agustus 2017 –sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022– menyampaikan visi “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” dan misi Panca Mulia yakni:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang akan dicapai oleh Pemda DIY pada tahun 2017-2022 yakni memanfaatkan momentum Abad Samudera Hindia untuk meningkatkan pemanfaatan

Perencanaan dan Perlambatan Kinerjanya



potensi kelautan di Sisi Selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Adapun tema misi “Panca Mulia”, manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan. Hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja meniscayakan perlunya kemantapan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika, dan kualitas sebagai “trilogi SDM-DIY”.

Berangkat dari Tema Visi tersebut dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan DIY dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan DIY pada umumnya. Sehingga dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022 dirumuskan visi:

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

Visi politis gubernur tersebut kemudian diselaraskan dengan data dan analisis teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang tergambarkan dalam misi untuk memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Memajukan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menyelesaikan persoalan daerah;
5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Panca Mulia tersebut kemudian dituangkan dalam rumusan dua misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

1. *Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban*



Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termuat pada Panca Mulia 1, 2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemda DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan;
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, menurunkan kesenjangan antar-kelompok pendapatan, dan menurunkan ketimpangan antar-wilayah
- d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

2. *Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis*

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan:

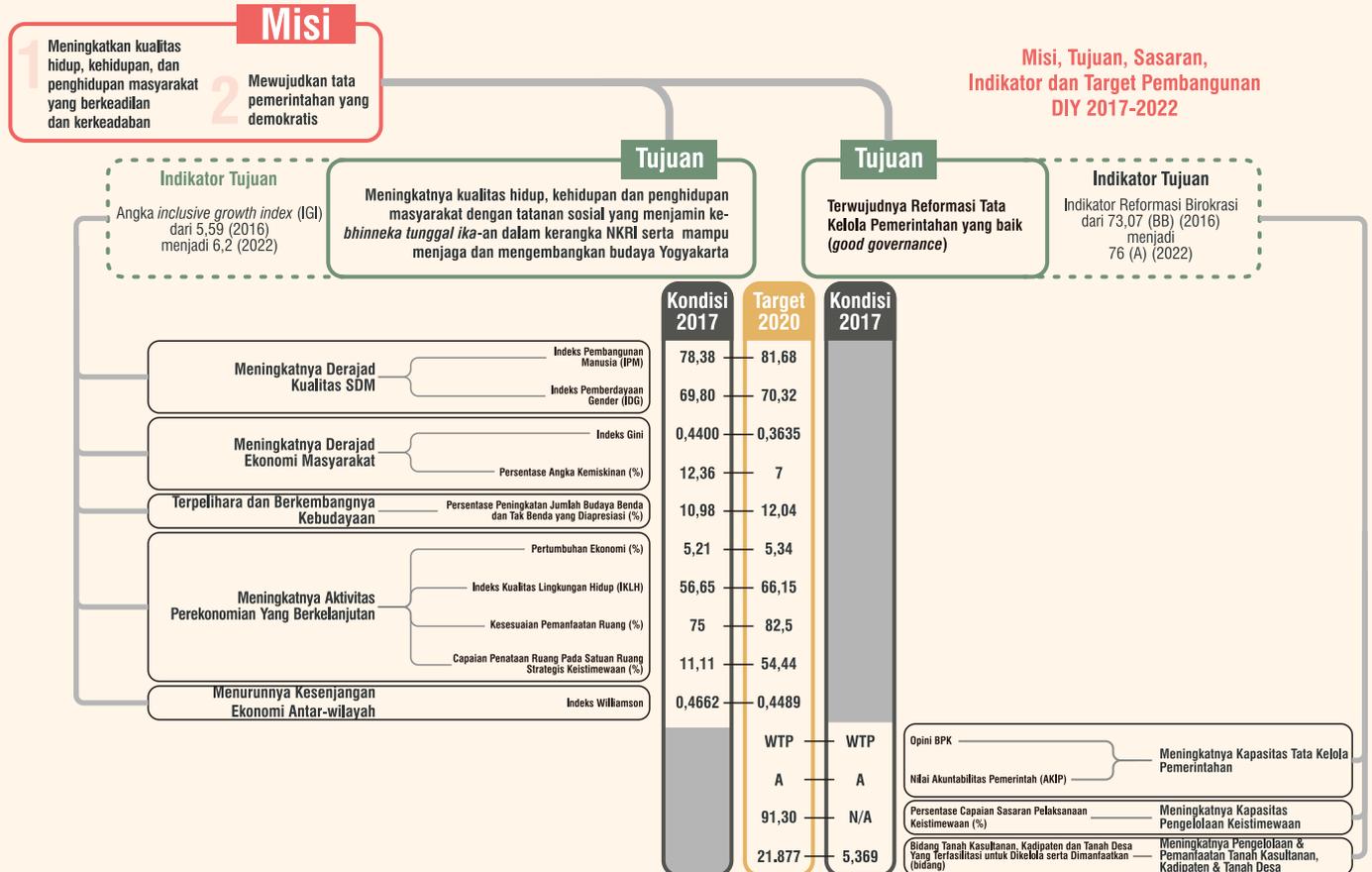
- a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horizontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horizontal antar SKPD).
- b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk



meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara

lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan.



Tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022. RPJMD DIY 2017-2022 sebagaimana telah ditetapkan melalui Perda No. 3 Tahun 2018, menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan. RPJMD DIY 2017-2022 juga menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2019 adalah: "Pemerataan Pembangunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan". Pemilihan tema tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu tema pembangunan dalam RPJPD DIY 2005-2025 dan RPJMD DIY 2017-2022, aspek keistimewaan, serta

tema pembangunan nasional dan fokus tematik. Tema RKPD DIY 2019 tersebut memiliki pengarusutamaan pada isu-isu sebagai berikut: kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, disparitas dan optimalisasi kawasan selatan (lokus kewilayahan). RKPD DIY Tahun 2019 telah memuat rencana kinerja yang akan diwujudkan pada tahun 2019 dilengkapi dengan indikator keberhasilan beserta dengan targetnya yang kemudian ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Jumlah Program Utama yang mendukung Sasaran Pemda DIY pada tahun 2019 sebanyak 211 Program. Total APBD DIY Tahun 2019 sebesar Rp5.978.131.574.404,65 dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp2.810.887.595.877,64.

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2019
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	80,72
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	70,02
2	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini	indeks	0,3846
		Persentase Angka Kemiskinan	persen	10,19
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang Diapresiasi	persen	11,68
		Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,26
4	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka indeks	60,51
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	78
		Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	persen	30,42
5	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	indeks	0,4552
6	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	opini	WTP
		Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	nilai	A
7	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	persen	73,91
8	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang Tanah Kasultanan , Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	bidang	9.419



Maori Whenua Whakatahi





Capaian 2018: 79,53
 69,64
 0,4220
 11,81%
 11,46%
 6,20%
 61,69
 77,05%
 21,53%
 0,4594
 WTP
 AA
 100%
 7.928 bidang

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

berhasilan visi dan misi pembangunan di DIY selama periode 2018-2022 dapat dilihat dari pencapaian target dari tolok ukur kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2019, kemudian disusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berjenjang dan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan.

% Capaian 2019	Indikator Kinerja
99,10%	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
100,19%*	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
88,71%	Indeks Gini
87,73%	Persentase angka kemiskinan
112,16%	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi
125,48%	Pertumbuhan Ekonomi
100,89%	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
101,09%	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
103,65%	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
101,82%*	Indeks Williamson
100%*	Opini BPK
150%	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) 1=AA;2=A;3=BB;4=B;5=CC;6=C;7=D
130,09%	Persentase capaian program urusan keistimewaan
113,91%	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

Keterangan: Tidak Tercapai Tercapai *) Data Sementara

Sumber: BPPSD DIY, 2020 (Data diolah)





Pencapaian Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian >100% sebanyak 11 indikator. Sedangkan persentase capaian < 100% sebanyak 3 indikator.

Kinerja Pemda DIY pada tahun 2019 yang dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama menunjukkan bahwa indikator yang memiliki persentase capaian >100% sebanyak 11 indikator dari total 14 indikator. Sedangkan 3 indikator belum tercapai, atau tingkat capaiannya berada pada aras <100%, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini, dan Persentase Angka Kemiskinan. Sebagai catatan, beberapa data masih merupakan angka sementara karena belum ada rilis resmi dari BPS. Perhitungan angka sementara dilakukan melalui Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah dengan pendekatan trend capaian tahun-tahun sebelumnya serta kondisi dari faktor pembentuk indikator tersebut.

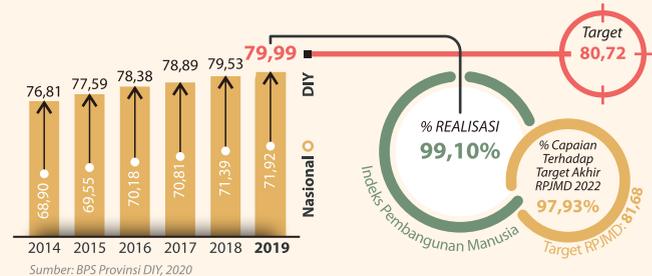
Sasaran Ke-1:
MENINGKATNYA DERAJAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Tolok ukur untuk mengetahui peningkatan derajat kualitas SDM yang ditetapkan dalam RPJMD DIY adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum pembangunan manusia DIY terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2014 sampai dengan 2019. IPM DIY meningkat dari 76,81 pada

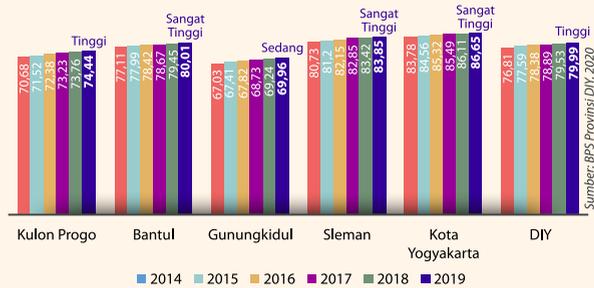
tahun 2014 menjadi 79,99 pada tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,64% per tahun dan levelnya tetap pada posisi 'tinggi'. Nilai IPM DIY juga selalu berada di atas rata-rata IPM nasional. Pada tahun 2019, IPM DIY sebesar 79,99 sedangkan nilai nasional sebesar 71,92. Nilai IPM yang tinggi tersebut menggambarkan bahwa harapan hidup, rata-rata dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita di DIY tergolong tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia.



Meskipun capaian IPM di DIY lebih baik dari rata-rata nasional, tetapi capaian IPM pada tahun 2019 sebesar 79,99 masih di bawah angka target RPJMD DIY 2017-2022 sebesar 80,72. Kondisi tersebut antara lain dipicu masih belum meratanya pencapaian nilai IPM pada masing-masing kabupaten/kota di DIY. Berdasarkan data IPM tahun 2019 terdapat tiga daerah yang masuk ke dalam kelompok IPM dengan nilai 'sangat tinggi' yaitu Sleman, Yogyakarta, dan Bantul, satu daerah masuk ke



dalam kelompok IPM dengan nilai 'tinggi' yaitu Kulon Progo, serta satu daerah dengan nilai 'sedang' yaitu Gunungkidul.

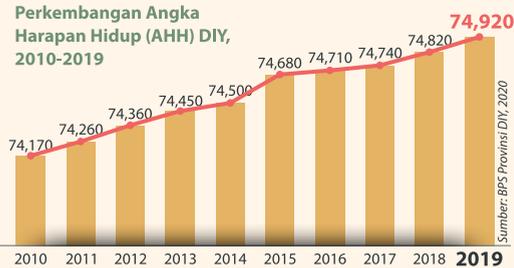


Pada level kabupaten/kota, tingkat IPM tertinggi pada tahun 2019 dicapai oleh Kota Yogyakarta sebesar 86,65 dan disusul Kabupaten Sleman yang mencapai 83,85 dan Bantul sebesar 80,01. IPM ketiga daerah tersebut berada di atas rata-rata DIY sebesar 79,99. IPM terendah terdapat pada Kabupaten Gunungkidul dengan nilai 69,96.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Angka Harapan Hidup (AHH)

Perkembangan AHH di DIY dalam kurun waktu 2010-2019 menunjukkan peningkatan dari 74,17 di tahun 2010 menjadi 74,92 di tahun 2019.



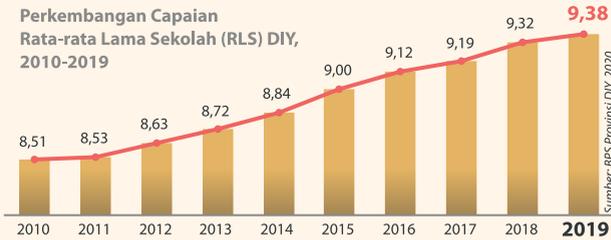
AHH dipengaruhi dari beberapa faktor seperti kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Pengaruh kesehatan dalam meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dari semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat. Dari capaian peningkatan AHH DIY diprediksi akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia sehingga diperlukan intervensi pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pada tingkat nasional, RLS Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 8,34 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,34 tahun atau menamatkan kelas VIII. Capaian RLS DIY tahun 2019 mencapai angka yang lebih tinggi dari nasional, yakni 9,38 dan terus menunjukkan tren peningkatan.

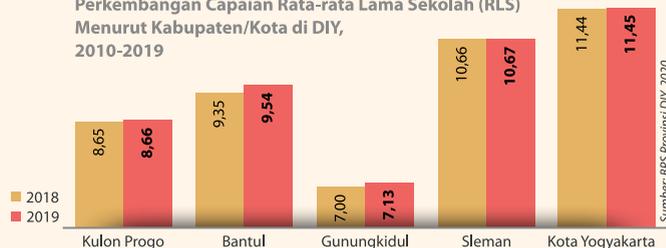


Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) DIY, 2010-2019



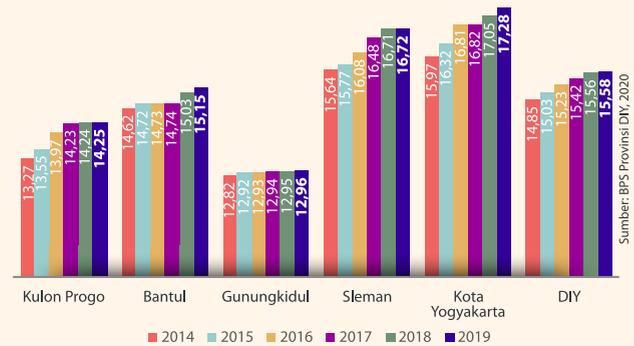
Dari data capaian RLS per kabupaten/kota, dapat dilihat bahwa ketimpangan antar wilayah terjadi pada pembangunan sektor pendidikan. Capaian RLS tahun 2019 tertinggi di DIY diraih oleh Kota Yogyakarta sebesar 11,45 tahun, sedangkan capaian terendah pada Kabupaten Gunungkidul sebesar 7,13 tahun. Hal ini berarti rata-rata penduduk Kota Yogyakarta menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah, sedangkan rata-rata penduduk Kabupaten Gunungkidul hanya mampu menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar. Adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan.

Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2010-2019



Harapan Lama Sekolah (HLS)

Capaian HLS DIY tahun 2019 sebesar 15,58 tahun, meningkat 0,02 poin dari tahun 2018. Capaian tertinggi kabupaten/kota pada tahun 2019 diperoleh Kota Yogyakarta sebesar 17,28 tahun dan capaian terendah diperoleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 12,96 tahun.

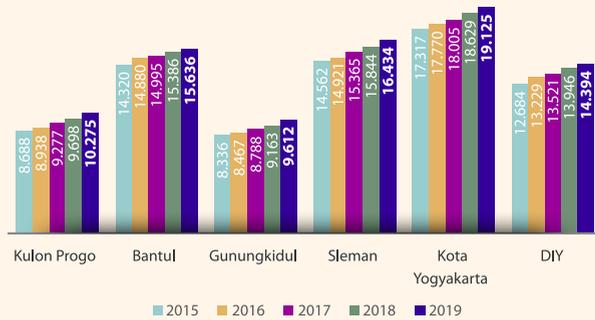


Pengeluaran Per Kapita Masyarakat

Data tahun 2019 menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita masyarakat di DIY telah mencapai angka Rp14.394.000,00. Pengeluaran per kapita dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan yang disebabkan kenaikan pengeluaran komoditas makanan maupun non makanan.

Pada tahun 2019, DIY menempati urutan kedua provinsi dengan IPM tertinggi setelah DKI Jakarta. Namun jika dilihat berdasarkan





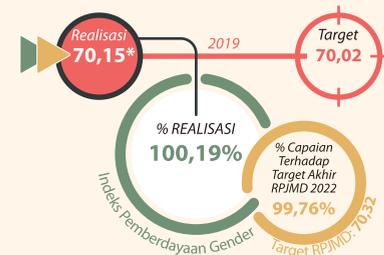
kabupaten/kota maka di DIY terdapat perbedaan nilai IPM yang cukup besar, Kota Yogyakarta dengan IPM tertinggi, sementara Gunungkidul dengan IPM terendah. Penyebab ketimpangan IPM di DIY dipengaruhi kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan pada sektor pembentuk IPM terutama di daerah yang masih tertinggal. Pada aspek kesehatan salah satu upaya adalah perbaikan pembangunan manusia melalui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dan bantuan jamban sehat untuk masyarakat miskin. Di sektor pendidikan, pemerataan akses pendidikan dilakukan melalui pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik serta bantuan bagi siswa miskin khususnya di daerah yang terbelakang. Sementara itu, ketimpangan kinerja ekonomi antar daerah diatasi dengan pemerataan produktivitas masyarakat antar wilayah.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Berdasarkan rilis BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam Buku Pembangunan berbasis gender tahun 2018, IDG DIY pada tahun 2018 adalah 69,64, capaian ini masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 72,10. Realisasi IDG DIY tahun 2019 sebesar 70,15 (angka sementara), angka tersebut melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 70,02.

Capaian IDG DIY tahun 2018, bila dilihat detail per kabupaten/kota, kabupaten Sleman dengan capaian 78,47 dan kota Yogyakarta sebesar 80,65 berada di atas rata-rata nasional, sedangkan tiga kabupaten lainnya masih di bawah rata-rata nasional yaitu Kabupaten Bantul (61,01), Kabupaten Gunungkidul (67,45) dan Kabupaten Kulon Progo (68,36).

Dari komponen penyusun IDG, komponen yang terendah di DIY adalah keterlibatan perempuan di politik dimana pada tahun 2018 baru sebesar 16,30%. Data tahun 2019 proporsi perempuan di DPRD DIY dan kabupaten/kota sebesar 18,18%, artinya meningkat dibanding tahun 2018.



Keterangan: Data sementara, dilalah BPPSD
Sumber: BPS, Provinsi DIY, 2020



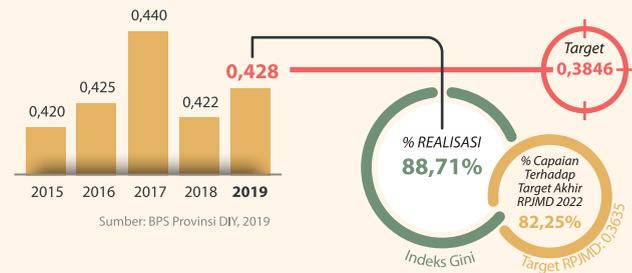
Upaya yang masih akan dilakukan untuk meningkatkan IDG adalah mendorong perempuan untuk mau dan mampu berkhirah di politik sehingga meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Langkah tersebut juga disertai advokasi, pemahaman kepada partai politik dan masyarakat sebagai pemilih untuk memahami pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen. Komponen lain yang perlu ditingkatkan adalah perlindungan perempuan di dunia kerja melalui kebijakan-kebijakan pro perempuan. Di samping itu, perlu juga mendorong sektor informal yang banyak dilakukan oleh perempuan sehingga berdampak positif pada sumbangan ekonomi perempuan. Selanjutnya pada tahun 2020 Pemda DIY akan menyusun Rapergub Pengarusutamaan Gender (PUG) yang di dalamnya juga terdapat Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG sebagai panduan seluruh Perangkat Daerah di Pemda DIY untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Sasaran Ke-2
MENINGKATKAN DERAJAT EKONOMI MASYARAKAT

Untuk mengukur tingkat keberhasilan Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat telah ditetapkan dua indikator yakni Indeks Gini dan Persentase Angka Kemiskinan.

Indeks Gini

Nilai Indeks Gini DIY tahun 2019 sebesar 0,4280, naik sebesar 0,006 poin dari nilai pada tahun 2018 sebesar 0,422 poin. Nilai Indeks Gini tahun 2019 tidak mencapai target sebesar 0,3846 atau tingkat capaiannya sebesar 88,71%. Selama tahun 2018 dan 2019, tingkat ketimpangan DIY lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ketimpangan nasional. Indeks Gini Indonesia adalah 0,384 pada tahun 2018 dan 0,380 pada tahun 2019.



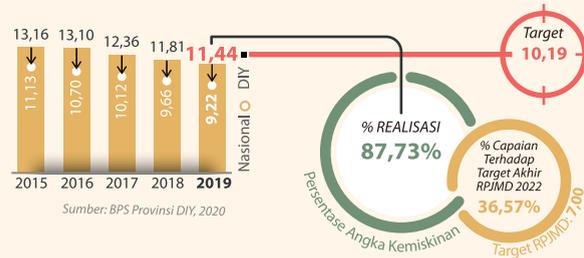
Peningkatan ketidakmerataan pendapatan masyarakat DIY dipengaruhi pertumbuhan pendapatan golongan masyarakat berpendapatan rendah yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan golongan masyarakat tinggi. Kelompok 40% masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan proporsi pendapatan yang semakin menurun. Hal tersebut berpengaruh searah pada kontribusi



pengeluaran di tiap kelompok masyarakat. Pada tahun 2019, 40% masyarakat berpendapatan terendah menyumbang sekitar 15,22% dari keseluruhan pengeluaran, menurun dari 15,65 di tahun sebelumnya. Sementara itu, 20% kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi menikmati proporsi pendapatan yang semakin bertambah yaitu dari 49,32% di tahun 2018 menjadi 49,60%. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat ketimpangan adalah pemerataan akses produktif bagi kelompok berpendapatan terendah dan peningkatan pertumbuhan lapangan usaha yang digeluti oleh mereka agar kelompok tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pengeluaran mereka. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pembinaan UMKM dalam berbagai aspek usaha dan peningkatan produktivitas sektor pertanian.

Persentase Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan DIY pada tahun 2019, sebesar 11,44% menurun 0,37 poin dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 11,81%. Penurunan tersebut disertai dengan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 440.890 jiwa pada September 2019 dari sebelumnya 450.250 jiwa pada September 2018. Persentase angka kemiskinan tahun 2019 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 10,19% atau dengan tingkat capaian sebesar 87,73%.



Selama lima tahun terakhir, terjadi penurunan persentase angka kemiskinan. Pada tahun 2015 angka kemiskinan adalah 13,16% dan senantiasa turun hingga menjadi 11,44% di tahun 2019 atau turun sekitar 1,72 poin. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin sebanyak 485.560 jiwa di tahun 2015 yang turun terus menjadi 440.890 jiwa di tahun 2019 dengan penurunan sebesar 9,1%. Penurunan persentase angka kemiskinan yang cukup tinggi mulai terjadi dari tahun 2017 sampai tahun 2019 didorong oleh lonjakan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di tahun 2017 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut meningkatkan pendapatan per kapita yang disertai terkendalinya laju inflasi yang tidak menyebabkan daya beli masyarakat turun terutama dari kelompok miskin. Walaupun terjadi kenaikan pendapatan per kapita namun kemiskinan masih terjadi, karena masih timpangnya pendapatan masyarakat dan belum efektifnya intervensi program kegiatan pengurangan kemiskinan



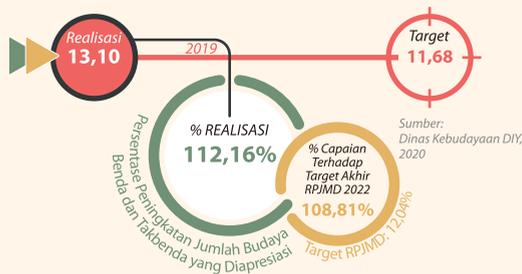
yang disebabkan antara lain *inclusion* dan *exclusion error* data masyarakat miskin. Untuk itu, upaya yang akan dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan adalah menjaga daya beli masyarakat, mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan efektivitas program kegiatan pengurangan kemiskinan.

Sasaran Ke-3 TERPELIHARA DAN BERKEMBANGNYA KEBUDAYAAN

Kebudayaan diposisikan sebagai payung dan arus utama pembangunan di DIY. Perhatian akan pembangunan kebudayaan di DIY tercermin dalam salah satu sasaran Pemda DIY sebagai penjabaran visi misi Gubernur DIY yaitu Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan di DIY yang diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi. Kinerja peningkatan jumlah budaya benda dan takbenda yang diapresiasi pada tahun 2019 adalah sebesar 13,10% dari target sebesar 11,68% (tingkat capaian 112,16%).

diakui sebagai kekayaan budaya baik nasional maupun internasional. Pemerintah RI melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1981 telah menetapkan 161 warisan budaya benda DIY sebagai kekayaan budaya benda nasional, sedangkan 1 warisan budaya DIY diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, warisan budaya takbenda DIY yang telah ditetapkan sebanyak 97 buah. Pemaknaan mendalam atas sebuah karya budaya takbenda mutlak dipahami untuk menangkap pesan-pesan yang tersirat dalam budaya jawa yang sarat akan simbol dan perlambang. Pesan-pesan filosofis di balik simbol dan perlambang itulah yang akan disampaikan dan diwariskan baik pada generasi sekarang maupun mendatang sehingga secara keseluruhan akan melingkupi tata hidup masyarakat Jawa khususnya DIY.

Pada tahun 2019, belum ada penambahan warisan budaya benda yang ditetapkan baik nasional maupun internasional, namun terdapat 30 warisan budaya tak benda yang ditetapkan yaitu: Sholawat Maulud Jawi, Dakon Yogyakarta, Jamasan Pusaka di Suroloyo, Cembrengan Yogyakarta, Sistem Organisasi Kampung Pitu, Sadranan Logantung Gunungkidul, Sadranan Alas Wonosari Gunungkidul, Sadranan Gunung Genthong Gunungkidul, Saparan Kembul Sewu Dulur Bendhung Khayangan, Nguras Enceh, Upacara



Capaian target tersebut merupakan jumlah dari warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi nasional dan internasional. Warisan budaya benda DIY telah



Adat Tunggul Wulung, Cupu Panjala, Sawah Surjan, pewarna alami Yogyakarta, Jabar Juwes, Lengger Tapeng, Dagelan Mataram, Srimpi Rengga Wati, Srimpi Teja, Ogleg, Sate Klathak Jejeran, Gerobak Sapi Yogyakarta, Andong Yogyakarta, Mie Lethek, Kerajinan Topeng Panji Yogyakarta, Kerajinan Kulit Tatah Sungging, Kipo, Dawet Camcau Yogyakarta, Growol, Dawet Sambel.

Pada akhirnya, tujuan utama dari pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan adalah mewujudkan tata hidup masyarakat yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan, yang ditempuh melalui: 1) Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan tak benda; 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan; dan 3) Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya, Desa, dan Kelurahan Budaya.

Sasaran Ke-4

MENINGKATNYA AKTIVITAS PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan adalah: (1) Pertumbuhan Ekonomi; (2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; (3) Kesesuaian

Pemanfaatan Ruang; dan (4) Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan.

Pertumbuhan Ekonomi

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY pada tahun 2019 menunjukkan kinerja perekonomian yang meningkat dibandingkan tahun 2018. PDRB DIY atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai 141,4 triliun rupiah, meningkat sebesar 11,53 triliun rupiah dibanding tahun 2018. Sementara itu, PDRB DIY 2019 atas dasar harga konstan mencapai 104,49 triliun rupiah, meningkat 6,47 triliun rupiah dibanding tahun 2018. Peningkatan PDRB DIY sejalan dengan meningkatnya kontribusi PDRB DIY terhadap Pulau Jawa sebesar 1,49%, naik 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada kontribusi DIY terhadap total 34 provinsi yang naik 0,01 poin, dari 0,87% menjadi 0,88%.

Lapangan usaha yang mendominasi struktur PDRB DIY pada tahun 2019 adalah Industri Pengolahan sebesar 12,85%, Konstruksi sebesar 11,11%, serta Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,35%. Peningkatan kontribusi sektor konstruksi seiring dengan pembangunan proyek Bandara Internasional Yogyakarta. Di sisi lain, kontribusi sektor industri pengolahan cenderung menurun dari tahun 2017 hingga 2019. Hal ini dikarenakan



sektor ini didominasi oleh industri skala kecil dan menengah (IKM), sehingga walaupun jumlah unit usahanya meningkat sebesar 2,29% pada tahun 2019, namun nilai output yang dihasilkan masih lebih kecil dibandingkan sektor konstruksi.



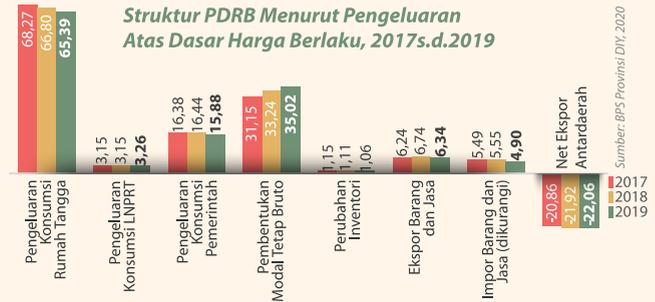
Tabel Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2017 s.d. 2019

Kategori/ Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (%)			Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	
Industri Pengolahan	13,13	12,99	12,85	-1,61
Konstruksi	9,49	10,28	11,11	12,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,33	10,22	10,35	-0,43
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	10,02	9,79	9,37	-4,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,58	8,59	8,47	-0,58
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,57	8,43	8,23	-2,82
Jasa Pendidikan	8,14	8,11	8,14	-0,18
Informasi dan Komunikasi	8,21	8,10	7,98	-2,08
Real estat	7,03	6,95	7,00	-0,78
Transportasi dan Pergudangan	5,69	5,75	5,64	0,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,90	3,93	4,00	1,66
Jasa Lainnya	2,61	2,60	2,59	-0,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,52	2,48	2,50	-1,18
Jasa Perusahaan	1,02	1,01	1,02	-0,49
Pertambangan dan penggalian	0,52	0,53	0,51	0,04
Pengadaan Listrik & gas	0,15	0,14	0,14	-6,67
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,00

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Berdasarkan pengeluaran, struktur perekonomian DIY tahun 2019 masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan pangsa distribusi sebesar 65,39%. Kontributor terbesar berikutnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto, yaitu sebesar 35,02%, yang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, konsumsi pemerintah mengambil posisi relatif stabil dengan kontribusi sebesar 15,88%. Ekspor luar negeri dan impor luar negeri memiliki kontribusi yang

seimbang, masing-masing sebesar 6,34% dan 4,90%. Hal ini berarti neraca perdagangan luar negeri DIY tetap dapat terjaga pada posisi surplus.

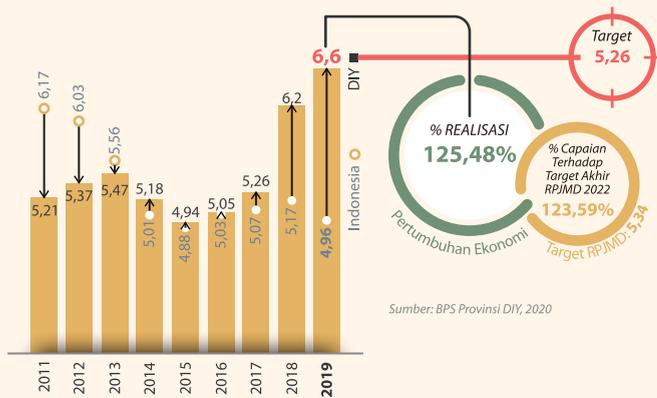


Perekonomian DIY dari sisi pengeluaran menunjukkan kemajuan yang terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin berkurangnya dominasi kontribusi Konsumsi Rumah Tangga. Sementara itu, kontribusi sektor investasi terus meningkat besarnya yang ditunjukkan dengan peningkatan total investasi PMA dan PMDN sebesar 206,89% pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2017. Di sisi lain, nilai ekspor pada tahun 2019 juga meningkat sebesar 24,82% jika dibandingkan tahun 2017, sehingga mendorong neraca perdagangan ekspor luar negeri DIY tetap mengalami surplus.

Kinerja perekonomian DIY tahun 2019 yang



diukur dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 6,60%. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi DIY selama periode sembilan tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi DIY selalu lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2014.



Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022, terlihat bahwa capaian pada tahun 2019 telah melampaui target. Bahkan telah melebihi target pada akhir RPJMD, dengan % realisasi di tahun 2019 sebesar 125,48%.

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi tahun 2019 dicapai oleh sektor Konstruksi sebesar 14,39%, diikuti Sektor

Pengadaan Air sebesar 8,90%, serta Sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,89%. Peningkatan sektor konstruksi masih terkait dengan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), proyek Jalur Jalan Lintas Selatan, *underpass* sepanjang 1,3 km di Kecamatan Temon, *underpass* Kentungan serta fasilitas pendukung lain. Sementara itu, musim kemarau yang panjang meningkatkan penyaluran air bersih bagi penduduk yang sulit mengakses air bersih, terutama di daerah Gunungkidul. Di sisi lain, peningkatan aktivitas pariwisata yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah wisatawan sebesar 860.288 orang pada tahun 2019 juga berdampak pada peningkatan *output* jasa akomodasi dan makan minum.

Terdapat enam sektor yang laju pertumbuhannya pada tahun 2019 lebih kecil dibandingkan tahun 2018, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor Administrasi Pemerintahan. Sektor Pertanian pertumbuhannya relatif lebih kecil dibanding tahun 2018 karena musim kering yang panjang, sehingga walaupun produksi keseluruhannya meningkat namun relatif kecil dibanding tahun lalu.



Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,60	1,46	1,94	2,16	1,03
2 Pertambangan dan Penggalian	0,12	0,42	3,39	10,59	3,04
3 Industri Pengolahan	1,75	5,07	5,74	5,12	5,73
4 Pengadaan Listrik dan Gas	(1,32)	14,26	3,96	3,31	5,43
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,90	2,36	3,46	5,13	8,90
6 Konstruksi	4,24	5,42	6,94	13,10	14,39
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,19	6,09	5,72	5,54	5,16
8 Transportasi dan Pergudangan	3,73	4,61	4,74	6,60	3,55
9 Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,77	5,51	6,21	6,77	8,89
10 Informasi dan Komunikasi	5,11	8,32	6,14	6,48	7,45
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	8,27	4,98	2,80	6,14	8,52
12 Real Estat	6,45	5,14	4,94	5,54	5,93
13 Jasa Perusahaan	7,31	3,43	5,86	5,51	6,75
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,18	5,57	4,51	4,06	3,30
15 Jasa Pendidikan	7,28	3,07	5,56	6,01	6,57
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,15	4,52	5,84	6,05	6,61
17 Jasa lainnya	8,00	5,70	5,76	6,19	6,25
DIY	5,18	4,94	5,05	6,20	6,60

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2019 dari sisi pengeluaran digerakkan oleh pertumbuhan semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 9,74%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan investasi atau besarnya belanja modal yang dapat menggerakkan ekonomi wilayah. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah pemerataan investasi antarwilayah, dikarenakan di luar keberadaan investasi besar berupa bandara di Kulon Progo, investasi masih terpusat di Sleman dan Kota Yogyakarta.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2018, hanya komponen konsumsi LNPR yang laju pertumbuhannya lebih tinggi pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh kegiatan terkait Pemilu yang berlangsung pada triwulan II hingga triwulan IV 2019.

Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran, 2015 s.d. 2019

No	Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,87	4,82	5,54	3,95	3,81	
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	2,90	-1,13	9,61	2,63	9,58	
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,32	2,11	3,06	3,47	3,12	
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,34	5,97	4,97	10,17	9,74	
5 Perubahan Inventori	4,73	7,24	2,02	3,54	0,03	
6 Ekspor Luar Negeri	3,15	-0,35	9,26	12,82	-0,07	
7 Impor Luar Negeri	15,46	20,48	9,19	6,22	-9,01	
8 Net Ekspor Antar-Daerah	-4,45	-16,10	2,39	3,15	-9,95	
PDRB DIY	4,94	5,05	5,26	6,20	6,60	

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Laju pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2019, sebagian besar masih diungkit oleh sektor konstruksi yang meningkat pesat, terutama terkait dengan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Hal ini berarti laju pertumbuhan ekonomi DIY di masa mendatang pascaselesainya pembangunan YIA dimungkinkan akan menurun. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berupa program/kegiatan di semua sektor dalam rangka memanfaatkan keberadaan YIA sebagai sarana prasarana pendukung konektivitas dan pembangkit kegiatan ekonomi wilayah.

Dari sisi pengeluaran, walaupun PMTB DIY pada tahun 2019 mengalami laju pertumbuhan tinggi seiring dengan meningkatnya realisasi investasi, namun masih diperlukan upaya untuk pemerataan investasi. Jenis-jenis investasi perlu difokuskan pada jenis investasi yang dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Lokasi pengembangan investasi di wilayah yang masih kurang berkembang, akan terus didorong dengan didahului kajian potensi investasi.



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

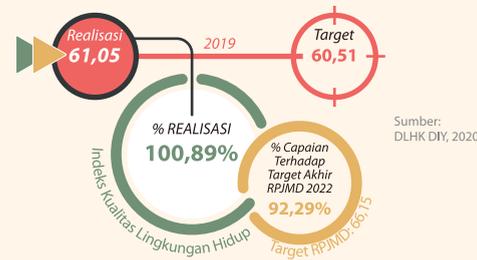
IKLH merupakan gambaran status lingkungan hidup suatu daerah pada periode tertentu secara kuantitatif, dalam hal ini dihitung setiap tahun selama periode 5 tahun. Nilai IKLH diperoleh dari agregasi perhitungan 3 indeks, yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA), diperoleh berdasarkan hasil pengukuran 7 (tujuh) parameter kualitas air di 10 sungai di DIY, yaitu parameter DO, BOD, COD, TSS, Fosfat, bakteri Coli tinja, dan bakteri Coli Total. Jumlah keseluruhan titik pemantauan sebanyak 50 titik. Periode pemantauan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu periode I pada bulan Maret, periode II pada bulan Juni dan periode III pada bulan September, yang merepresentasikan musim hujan, peralihan dan kemarau. Dengan demikian, terdapat 50 titik pemantauan dipantau selama 3 periode sehingga jumlah sampel uji sebanyak 150 sampel. Realisasi nilai IKA DIY pada tahun 2019 sebesar 38,65.
2. Indeks Kualitas Udara (IKU), berdasarkan Permen LHK Nomor 78 tahun 2016 bahwa pengukuran IKU diperoleh dari pengukuran parameter SO_2 dan NO_2 . Parameter NO_2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO_2 mewakili

emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai IKU DIY pada tahun 2019 sebesar 85,25.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Asumsi yang digunakan dalam perhitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30% dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3% dari luas administrasinya. Data luas tutupan lahan DIY tahun 2019 setelah melalui faktor konversi terhitung 129.128,95 Ha, sehingga jika dimasukkan dalam rumus di atas hasilnya adalah 59,70.

IKLH diperoleh dari $= (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$, hasil perhitungan dengan rumus tersebut diperoleh IKLH sebesar 61,05.



Capaian IKLH DIY tahun 2019 sebesar 61,05, - mengacu pada kategori IKLH secara nasional- termasuk dalam predikat cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian IKLH DIY pada tahun 2019, yaitu :

1. *Indeks Kualitas air (IKA)*. Tingginya parameter bakteri coli menunjukkan bahwa pengelolaan limbah domestik belum tertangani dengan baik. Hal ini berdampak pada turunnya IKA tahun 2019 jika dibandingkan tahun sebelumnya
2. *Indeks Kualitas Udara (IKU)*. Nilai IKU secara kualitas dikategorikan masih baik meskipun terdapat beberapa faktor penghambat seperti penurunan kualitas emisi gas buang yang berasal dari kendaraan bermotor dan industri.
3. *Indeks Kualitas Tutupan vegetasi IKTL*. Terjadi penurunan angka IKTL dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini terjadi karena adanya perubahan metode perhitungan dan kriteria jenis tutupan vegetasinya. Metode yang digunakan saat ini adalah dengan metode citra satelit.

Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, antara lain:

1. Mengidentifikasi sumber pencemar dan membuat inovasi teknologi yang implementatif, pembuatan jamban

terpadu serta penyedotan jamban secara berkala. Hal ini selain sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas air, juga sebagai bagian dari upaya pemulihan kualitas air. Kegiatan penambahan debit aliran air sungai dengan menghidupkan kembali mata air yang ada di sekitar sungai juga menjadi alternatif solusi. Dengan bertambahnya debit aliran air sungai, maka zat pencemar akan terencerkan. Seiring dengan pengurangan debit limbah cair yang masuk ke sungai maka kualitas air sungai akan semakin baik.

2. Perlu terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas udara melalui pembinaan kepada pelaku usaha agar melakukan pengelolaan emisi yang lebih baik, dari segi penggunaan bahan bakar yang berkualitas maupun pemeliharaan sarana pengolahan emisi.
3. Upaya penambahan luas tutupan vegetasi dilakukan dengan penanaman di hutan rakyat. Penanaman di lahan pantai juga dapat dioptimalkan untuk menambah luas tutupan vegetasi.

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada kabupaten/kota dan masyarakat dalam bentuk



monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun kabupaten/kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan RTRW provinsi. Indikator Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Selain itu, perlu juga memperhitungkan kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari struktur ruang yang dihitung dengan membandingkan struktur ruang eksisting terhadap struktur ruang RTRW DIY.

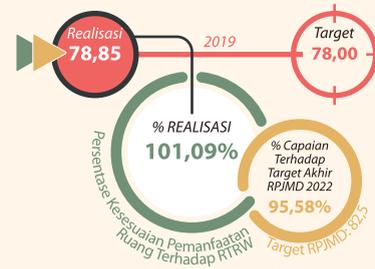
Berdasarkan Permen ATR No. 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Permen ATR No. 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Audit Tata Ruang maka capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2019 diperoleh dari hasil perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perbandingan antara peta pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting.

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2018 sebesar 77,05%, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 78,85% atau melebihi

target tahun 2019 yaitu 78% sehingga persentase realisasi tahun 2019 adalah 101,09%.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 82,5% maka capaian tahun 2019 sebesar 95,58%.

Perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan hasil pemantauan dianalisis dengan membandingkan antara kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya dengan luas kawasan lindung dan luas kawasan budidaya. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung diperoleh dari pemanfaatan ruang kawasan lindung eksisting dibandingkan dengan luas pemanfaatan ruang kawasan lindung pada RTRW, sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya diperoleh dari pemanfaatan ruang kawasan budidaya eksisting dibandingkan dengan luas pemanfaatan ruang kawasan budidaya pada RTRW. Terdapat tiga klasifikasi yakni sesuai, tidak sesuai, dan belum terwujud melalui proses *superimpose* antara peta rencana pola ruang dengan peta penggunaan lahan tahun 2019.



Kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di DIY sebesar 86,55% dengan ketidaksesuaian sebesar 13,45%. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya di DIY sebesar 78,38%, belum terwujud sebesar 16,28%, dan tidak sesuai sebesar 5,35%. Sehingga, kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW pada tahun 2019 sebesar 78,85%.

Pengendalian pemanfaatan ruang masih menjadi tantangan dalam mempertahankan maupun meningkatkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikarenakan seiring dengan banyaknya kawasan yang berkembang dengan pesat diantaranya aktivitas kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pembangunan perumahan, serta aktivitas sosial ekonomi lainnya yang perkembangannya semakin pesat. Upaya Pemda DIY untuk mempertahankan kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan antara lain melalui:

1. Pendampingan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh Kabupaten/ Kota;
2. Tindakan Non Yustisi
3. Melakukan sosialisasi indikasi program RTRW kepada OPD, Kabupaten/Kota, masyarakat, *stakeholder* terkait untuk menjadikan indikasi program RTRW tersebut sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan untuk

mendukung kesesuaian perwujudan pemanfaatan ruang;

4. Saat ini sedang dilakukan penyusunan Rapergub tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif (sebagai amanat dari Pasal 95 Perda Nomor 5 tahun 2019). Pemberian insentif dan disinsentif ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan

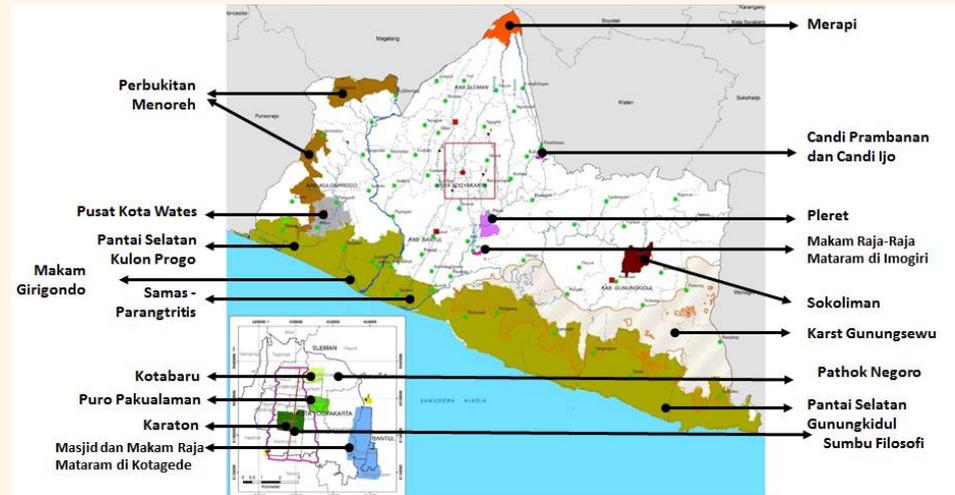
Sesuai dengan Perdas No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, tujuan pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten adalah untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta dipergunakan untuk membangun harmonisasi dengan satuan ruang lainnya. Pelaksanaan penataan



ruang di satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dilakukan dengan cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang. Dalam mendukung capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis ini peran pemerintah daerah dalam Fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten bersifat memberikan bantuan dalam hal:

1. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
2. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
3. penyusunan rencana induk pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
4. pelaksanaan Penataan Ruang;
5. penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Rencana Tata Ruang;
6. penanganan sengketa atas pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
7. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan Ruang;

8. pengendalian pemanfaatan Ruang; dan
9. pengawasan terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.



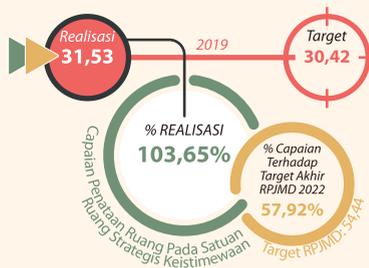
Implementasi penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan menjadi salah satu indikator kinerja utama DIY dengan indikator capaian Penataan Ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan. Indikator tersebut merupakan Persentase capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan meliputi:

1. Penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang:
 - a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang



- b. Penyusunan Rencana Induk (Masterplan)
 - c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
2. Pemanfaatan Ruang
 3. Pengendalian Pemanfaatan ruang

Dari target kinerja untuk sasaran Capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan, pencapaian untuk tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018. Capaian Persentase penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan adalah sebesar 31,53% dari target yang ditetapkan sebesar 30,42% atau setara 103,65%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini mencapai 57,92% dari target kinerja akhir RPJMD sebesar 54,44%. Indikator ini diukur dari jumlah persentase capaian satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa rencana rinci, rencana induk, dan RTBL, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis.



Realisasi capaian kinerja tersebut di dukung dengan jumlah Satuan Ruang Strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci, rencana

induk dan RTBL sebesar 13,06%, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan 9,58% dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis sebesar 8,89%. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun 2019 mengalami peningkatan dimana pada satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci, rencana induk dan RTBL mengalami peningkatan sebesar 3,89%, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan mengalami peningkatan 2,77%, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis mengalami peningkatan 3,33%.

Upaya Pemda DIY untuk mempertahankan penataan ruang pada kawasan keistimewaan dilakukan melalui:

1. Percepatan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) pada 18 Satuan Ruang Strategis (SRS) sesuai dengan amanat Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
2. Percepatan penyusunan rencana induk pemanfaatan ruang pada 18 SRS;
3. Pendampingan percepatan penyusunan RDTR pada 18 SRS oleh Kabupaten/Kota
4. Tindakan Non Yustisi pada SRS;

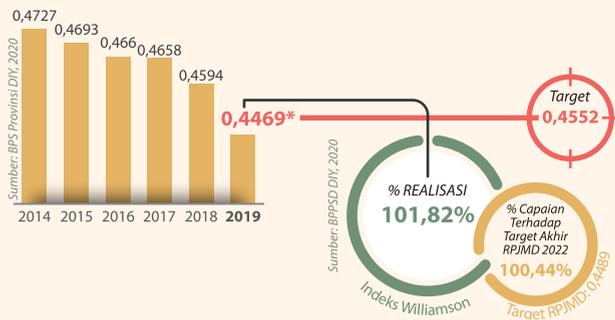


- Sosialisasi indikasi program RTRW kepada OPD, Kabupaten Kota, masyarakat, stakeholder terkait untuk menjadikan indikasi program RTRW tersebut sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan untuk mendukung kesesuaian perwujudan pemanfaatan ruang pada 18 SRS.

Sasaran Ke-5 MENURUNNYA KESENJANGAN EKONOMI ANTARWILAYAH

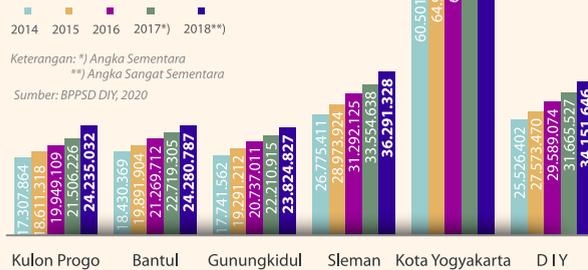
Indeks Williamson DIY pada periode 2014 hingga 2019 cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 1,11%. Hal ini berarti disparitas ekonomi antar kabupaten dan kota di DIY semakin menyempit dari tahun ke tahun.

Disparitas ekonomi antar wilayah DIY pada tahun 2019 sebesar 0,4469 (angka sementara) mengalami penurunan sebesar 0,0125 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berarti disparitas ekonomi antar wilayah di DIY lebih baik dibandingkan tahun 2018. Capaian indeks Williamson tahun 2019 telah melampaui



target RPJMD tahun 2019 dengan realisasi 101,82%, bahkan telah melampaui target akhir RPJMD 2022.

PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga berlaku, 2014 s.d. 2019



Hingga tahun 2018 disparitas pendapatan antarwilayah masih cukup tinggi. Nilai PDRB per kapita tertinggi masih didominasi oleh kota Yogyakarta sebesar Rp79,1 juta disusul Kabupaten Sleman sebesar Rp36,3 juta. Dua daerah ini memiliki nilai PDRB per kapita di atas rata-rata DIY. Sementara tiga kabupaten lainnya memiliki nilai PDRB per kapita di bawah rata-rata DIY. Kabupaten Gunungkidul memiliki nilai PDRB per kapita terendah dengan nilai PDRB per kapita sebesar Rp23,8 juta, sedangkan Kabupaten Bantul memiliki nilai PDRB per kapita sedikit lebih tinggi sebesar 24,28 juta dan Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp24,23 juta.



Kota Yogyakarta meskipun masih menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi, namun perkembangannya telah mengarah pada titik jenuh. Sedangkan Kabupaten Sleman yang juga sebagai daerah penyangga Kota Yogyakarta secara relatif memiliki nilai PDRB per kapita tertinggi dari kabupaten lainnya dan masih memiliki potensi untuk terus berkembang. Bantul sebagai daerah penyangga kedua juga berkembang relatif cepat. Kulon Progo yang diprediksi memiliki perkembangan ekonomi tinggi karena adanya mega proyek Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), namun nilai PDRB per kapitanya masih di bawah Bantul, namun demikian nilai PDRB per kapitanya masih kalah dengan Bantul. Kulon progo memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan daerah lainnya sebesar 8,12%, hal ini memungkinkan untuk tahun-tahun selanjutnya Kulon Progo akan menjadi pusat pertumbuhan baru seiring dengan beroperasinya YIA. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul masih mengandalkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sehingga suntikan investasi masih sangat diperlukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul.

Pengembangan pusat pertumbuhan baru terutama di wilayah tertinggal telah menjadi komitmen pemerintah dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Di

samping itu, pemerataan pembangunan ekonomi juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas di sektor-sektor dominan dan penyediaan infrastruktur di daerah-daerah yang masih tertinggal. Untuk mengurangi disparitas antara kabupaten yang memiliki PDRB per kapita di bawah rata-rata DIY serta untuk mempertahankan capaian di masing-masing kabupaten, Pemda DIY menyusun program strategis pembangunan, diantaranya adalah penyelesaian pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto yang saat ini sedang dalam proses KPBU serta diusulkan dalam Major Projects dalam RKP 2021. Hal ini untuk mempertahankan capaian pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kabupaten Kulon progo serta untuk mendukung eksistensi Bandara Internasional Yogyakarta. Serta percepatan penyelesaian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Piyungan-Sentolo untuk mendukung industri kreatif di DIY. Untuk mempertahankan capaian PDRB per kapita di Kabupaten Bantul, Pemda DIY memiliki proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Samas-Parangtritis untuk mendukung investasi di Kabupaten Bantul. Serta mendorong pembangunan pelabuhan perikanan Pantai Gesing di Kabupaten Gunungkidul untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan.



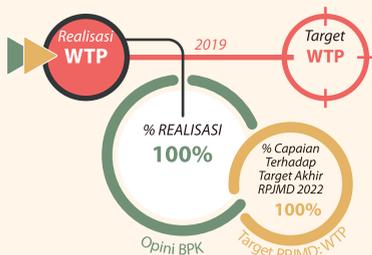
Sasaran Ke-6

MENINGKATNYA KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Sasaran meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan diukur dengan dua indikator yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Opini BPK

Pada tahun 2019, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan No. 16A/LHP/XVIII.YOG/05/2019, LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 16B/LHP/XVIII.YOG/05/2019 dan LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Nomor 16C/LHP/XVIII.YOG/05/2019. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kesembilan kalinya sejak Laporan Keuangan Tahun 2010.



Keberhasilan Pemda DIY dalam mempertahankan opini WTP tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut:

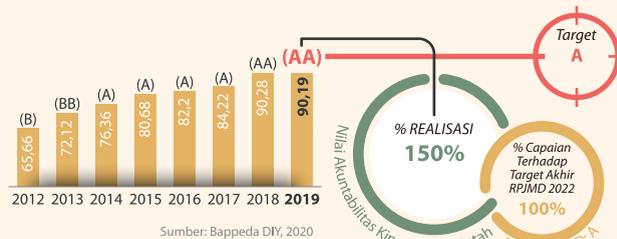
1. Komitmen dan dukungan semua *stakeholder* laporan keuangan.
2. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah. Hasil-hasil tugas pengawasan membantu memberikan keyakinan yang memadai dan peringatan dini (*early warning system*) terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, kelemahan, maupun tindak pelanggaran terhadap sistem akuntabilitas instansi pemerintah.
3. Tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK pada pemeriksaan periode sebelumnya agar tidak terjadi berulang.
4. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan-perubahan regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai AKIP DIY pada tahun 2019 diperoleh dari Penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebesar 90,19 dengan predikat "AA". Pemda DIY merupakan satu-satunya Pemda yang memperoleh Predikat AA yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP.



Predikat AKIP “AA” menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemda DIY sudah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Sebelumnya, Pemda DIY empat tahun berturut-turut (2014–2017) menyandang predikat A dan mulai tahun 2018 telah mendapatkan predikat AA. Dengan perolehan predikat AA, maka nilai AKIP dalam RPJMD 2018–2022 telah terlampaui. Capaian kinerja AKIP tahun 2019 tersebut didorong oleh keberhasilan Pemda DIY dalam melakukan penyusunan kelembagaan berbasis kinerja (*performance based organization*).



Meskipun predikat AA masih bisa dipertahankan, namun ada penurunan poin dalam penilaian tahun 2019 sebesar 0,09 poin. Penurunan nilai AKIP DIY pada tahun 2019 ini bila dibandingkan tahun 2018 terletak pada komponen perencanaan kinerja sebesar 0,26

poin dari 27,91 menjadi 27,62. Kemudian juga dari komponen pengukuran kinerja yang menurun sebesar 0,11 poin dari 21,85 menjadi 21,74. Dua komponen ini mengalami penurunan sementara komponen yang lain mengalami peningkatan.

Penilaian AKIP mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja Pemda DIY saat ini yaitu kualitas sistem, dokumen pendukung, praktik, hal-hal substantif yang telah dilakukan, serta konsistensi dan keberlanjutan implementasinya. Secara umum, Pemda DIY telah menerapkan budaya kinerja dibuktikan dengan penyusunan dokumen terkait kinerja secara formal mulai dari RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja, serta telah menetapkan ukuran kinerja individu. Pemda DIY telah melakukan cascading kinerja yang menggambarkan sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan sebagai upaya mencapai sasaran, dan telah menetapkan secara formal dan berjenjang indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja utama (*core business*). Sinergitas dan koordinasi implementasi SAKIP antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dinilai sudah berjalan efektif sehingga perkembangan SAKIP pemerintah kabupaten/kota telah memperlihatkan



kemajuan yang progresif. Keberhasilan Pemda DIY dalam pembentukan struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah.

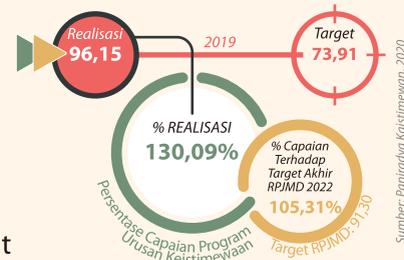
Dari hasil penilaian masih terdapat beberapa catatan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja yaitu: (1) Reviu Renstra OPD untuk lebih memastikan hubungan antara definisi kinerja, target kinerja serta strategi pencapaian yang merupakan proses bisnis pencapaian kinerja; (2) Menyempurnakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja tidak hanya melihat pelaksanaan program dan kegiatan semata tetapi juga diperluas hingga pencapaian outcome dan impact yang menjadi prioritas organisasi serta diperluas untuk pencapaian program-program lintas OPD; (3) Memperluas pelaksanaan reviu kinerja secara berjenjang tidak hanya pada tingkatan organisasi namun juga pada tingkatan individu secara berjenjang dengan lebih mengoptimalkan aplikasi kinerja yang sudah ada; (4) Penguatan kapasitas Inspektorat dengan meningkatkan pemahaman tentang manajemen kinerja sektor publik dengan lebih baik lagi. Upaya perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja diantaranya yaitu pemberian reward and punishment bagi organisasi dan individu berdasarkan kinerja dengan mengintegrasikan

perjanjian kinerja ke dalam SKP secara berjenjang, dan memantapkan sistem pengendalian internal OPD.

Sasaran Ke-7 MENINGKATNYA KAPASITAS PENGELOLAAN KEISTIMEWAAN

Sasaran Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan, dengan indikator Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan, capaian indikator tersebut pada tahun 2019 sebesar yaitu 96,15%, melebihi target sebesar 73,91%, sehingga persen realisasi sebesar 130,09%. Selanjutnya, jika melihat target akhir periode RPJMD (tahun 2022) sebesar 91,30%, maka capaian tahun 2019 juga sudah melebihi target akhir tahun, dengan persen capaian 105,31%.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja 26 program keistimewaan yang dilaksanakan pada tahun 2019, terdapat satu indikator kinerja program yang tidak mencapai target yaitu jumlah desa mandiri budaya. Disebut desa mandiri budaya apabila desa tersebut memenuhi kriteria sebagai desa budaya berkategori maju, desa wisata berkategori maju, desa prima



berkategori maju, dan desa preneur berkategori maju. Target tidak tercapai karena dari lima desa yang ditargetkan pada tahun 2019 belum memenuhi semua kriteria terutama pada kriteria desa wisata berkategori maju, desa prima berkategori maju, dan desa preneur berkategori maju.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketercapaian indikator yaitu keselarasan program-program kegiatan keistimewaan dengan dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah; adanya regulasi yang mengatur perencanaan pelaksanaan dan pengendalian keistimewaan yang lengkap; serta koordinasi dan jejaring yang sangat solid antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

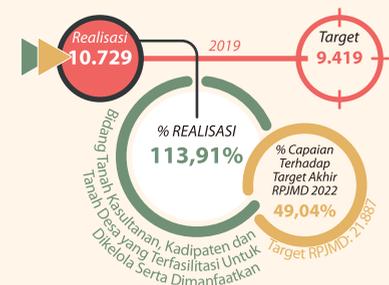
Meskipun capaian kinerja dapat tercapai melebihi target, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Program Keistimewaan, yaitu perubahan tata laksana kelembagaan di Pemerintahan Pusat, serta Perbedaan tingkat pemahaman masyarakat tentang keistimewaan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut yaitu dengan menjalin dan menguatkan jejaring pemangku kepentingan keistimewaan, serta peningkatan penyebarluasan informasi keistimewaan agar tingkat pemahaman masyarakat tentang dana keistimewaan semakin merata.

Sasaran Ke-8

MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN, KADIPATEN, DAN TANAH DESA

Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari Tanah Keprabon, dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon, yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Tanah bukan keprabon atau dede keprabon terdiri dari tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak *Anggaduh*, tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi yang telah dan belum memiliki serat *kekancingan*, serta tanah yang belum digunakan.

Bidang tanah kasultanan, kadipaten yang difasilitasi dan dikelola berdasarkan data inventarisasi adalah sebanyak 14.044 bidang. Jumlah bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten tersebut sesuai dengan langkah penatausahaan maka dilakukan pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten sebagai upaya untuk memiliki kepastian hukum. Pada tahun 2019 ditargetkan Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan sebanyak 9.419 bidang.



Capaian Kinerja Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan untuk tahun 2019 telah melampaui target. Dari target 9.419 bidang yang sudah terealisasi adalah 10.729 bidang atau mencapai 113,91%. Perhitungan bahwa jumlah total bidang SG, PAG dan Tanah Desa yang telah didaftarkan agar memiliki kepastian hukum 10.729 bidang dari total 13.877 bidang. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan, sampai dengan tahun 2019 telah didaftarkan sebanyak 10.729 bidang dan telah terbit sebanyak 4.944 sertifikat. Persiapan pendaftaran tanah pada tahun berikutnya sudah dilakukan pemberkasan sebanyak 1.600 bidang.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa, yaitu adanya petunjuk teknis sertifikasi tanah desa yang asal usulnya dari tanah kasultanan baru diterbitkan akhir tahun 2019, sehingga pada tahun 2019 masih belum ada pendaftaran tanah desa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi tanah desa yang sudah bersertifikat sebagai langkah awal sebelum melakukan sertifikasi tanah desa sesuai dengan petunjuk teknis.



Akuntabilitas Keuangan



REALISASI ANGGARAN

Pencapaian Kinerja sasaran didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan. Dukungan anggaran belanja langsung untuk Program/Kegiatan strategis yang mendukung sasaran pada tahun 2019 sebesar Rp2.357.992.601.266,00, yang realisasinya pada akhir tahun Rp2.118.597.906.487,00 atau sebesar 89,85%. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa sebesar 95,30%. Sedangkan penyerapan anggaran terkecil, ada pada sasaran Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat sebesar 79,18%.

Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi	Sasaran	Realisasi Anggaran Menurut Sasaran
763.487.858.600	681.115.799.369	89,21%	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	
108.717.202.603	86.083.586.541	79,18%	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	
323.975.759.851	307.735.308.249	94,99%	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	
677.285.221.137	638.565.476.726	94,28%	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	
257.860.885.745	219.319.591.953	85,05%	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar-Wilayah	
208.205.620.510	168.586.291.870	80,97%	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	
7.559.039.220	6.803.259.020	90,00%	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	
10.901.013.600	10.388.592.759	95,30%	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	



ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi pada pelaporan ini berdasar capaian kinerja dan besaran sisa anggaran pada setiap sasaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari delapan sasaran, terdapat lima sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan, capaian kinerja sebesar 112,16% dengan efisiensi anggaran sebesar 5,01%.
2. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan, capaian kinerja rata-rata dari keempat indikator sebesar 107,77% dengan efisiensi anggaran 5,72%.
3. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah, capaian kinerja sebesar 101,82, dengan efisiensi anggaran sebesar 14,95%.
4. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan, capaian kinerja rata-rata dari kedua indikator sebesar 125% dengan efisiensi anggaran 19,03%.
5. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan, capaian kinerja sebesar

- 130,09% dengan efisiensi anggaran 10%.
6. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa, capaian kinerja sebesar 113,91% dengan efisiensi anggaran 4,7%.

Efisiensi anggaran di Pemda DIY, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan standar belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.



Sustainable Development Goals

(SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan global tahun 2016 sampai dengan tahun 2030 yang disepakati oleh 193 kepala negara di dunia. SDGs membawa lima prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu : *People* (Manusia), *Prosperity* (Kemakmuran), *Peace* (Perdamaian), *Planet* (Bumi), dan *Partnership* (Kemitraan) yang direpresentasikan dalam 17 tujuan dan 169 sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain dengan semangat tidak ada seorang pun yang ditinggalkan (*no one left behind*). 17 tujuan SDGs tersebut adalah : 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 11) Kota dan Pemukiman Berkelanjutan, 12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, 13) Penanganan Perubahan Iklim, 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)

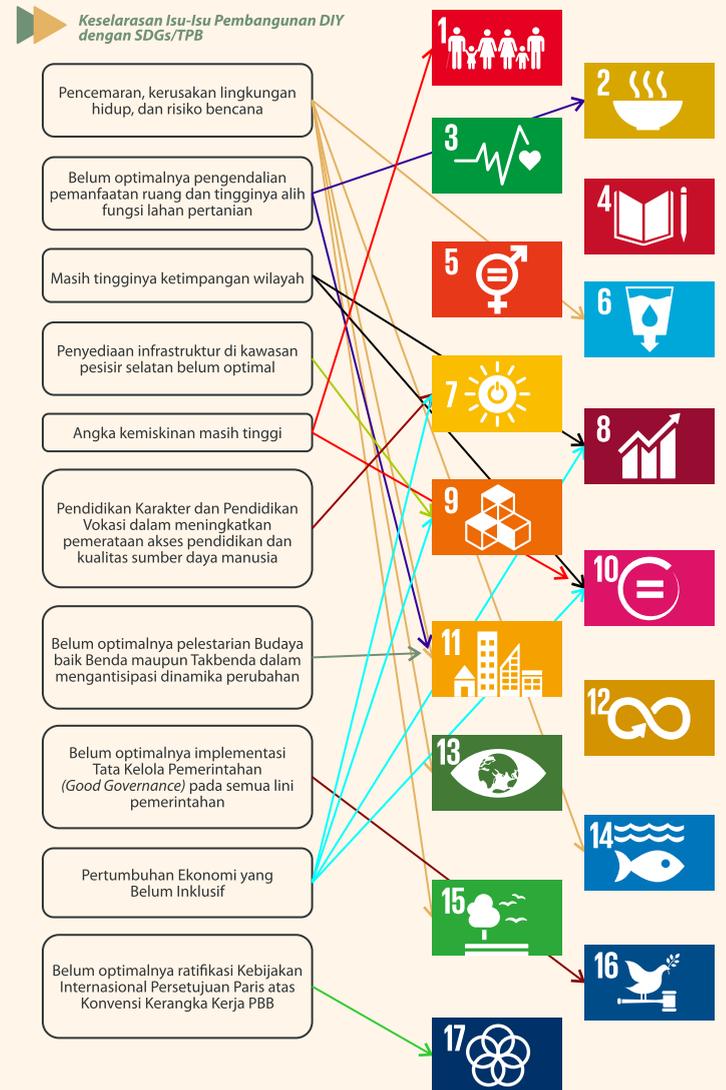
Daratan, 16) Perdamaian, Kedamaian, dan Kelembagaan yang Tangguh, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Komitmen Pemda DIY dalam menjalankan SDGs ditindaklanjuti melalui penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) yang dipayungi dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) 2018-2022. Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RAD TPB 2018-2022, telah dibentuk tim lintas sektoral dan lintas stakeholder melalui SK Gubernur Nomor 124/TIM/2018 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB DIY.



RAD TPB DIY telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Keselarasan tersebut dapat diamati pada isu-isu strategis yang diangkat dalam pembangunan berkelanjutan DIY seperti pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan risiko bencana, belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian, dan risiko bencana, belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang, ketimpangan wilayah, belum optimalnya penyediaan infrastruktur strategis di kawasan pesisir, dan tingginya angka kemiskinan.

Pelaksanaan RAD TPB/SDGs dilaksanakan secara multi sektoral dengan melibatkan OPD di lingkungan Pemda DIY, LSM/NGO, dan lingkungan akademisi. Dari 160 indikator SDGs yang diintervensi dalam RAD TPB DIY, hasil evaluasi pelaksanaan RAD TPB tahun 2019 sebagai berikut: (a) 103 indikator tercapai; (b) 42 indikator diprediksi tercapai (pada umumnya data belum final namun diestimasikan akan tercapai oleh OPD pengampu); (c) 3 indikator tidak tercapai; dan (d) 12 indikator belum tersedia data (data belum final dan belum dapat diestimasikan oleh OPD Pengampu).



Hasil evaluasi tersebut menjadi catatan dalam rangka pencapaian tujuan SDGs baik pusat maupun daerah. Adapun 3 indikator yang tidak tercapai adalah: Angka Kemiskinan, Angka Ketimpangan (Indeks Gini), dan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Angka kemiskinan tidak tercapai karena salah satu komponen penghitungan yaitu pengeluaran konsumsi pada faktor makanan yang masih rendah, sementara banyak faktor yang mempengaruhi tidak hanya karena daya beli tetapi faktor lain seperti karakter masyarakat DIY tidak menitikberatkan pengeluarannya pada faktor tersebut. Hal ini menjadi anomali di DIY karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks kebahagiaan, Indeks Demokrasi, Indeks Ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Kebudayaan dan Indeks Kemiskinan Multidimensi tinggi, juga Indeks Desa Membangun (IDM) tidak ada lagi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Anomali ini juga berdampak pada Ketimpangan yang diukur dengan Rasio Gini. Cakupan JKN dengan perhitungan Universal Health Coverage (UHC) menjadi merosot dari 96 menjadi 92 persen karena terjadi pencoretan

kepesertaan PBI JKN oleh BPJS pada 2019 dengan alasan untuk menepatkan sasaran.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Kaji ulang RAD SDGs/TPB DIY berdasarkan hasil monev 2019 dan masukan unsur-unsur pelaku SDGs
2. Membuat laporan pemantauan dan evaluasi berdasarkan Pedoman Teknis Pemantauan Monitoring Evaluasi RAD SDGs/TPB yang dibuat oleh pusat.
3. Peningkatan peran serta seluruh unsur pelaku SDGs baik Pemerintah, non Pemerintah dan Akademisi
4. Pemutakhiran Sistem Informasi Kemiskinan SIMNANGKIS dengan menu SDGs, CSR dan E-Lapor masalah kemiskinan.



Sentuhan Inovasi Daerah





<https://myimage.id/pembangkit-listrik-hybrid-pantai-pandansimo/>

aju perkembangan zaman yang semakin dinamis menuntut Pemda DIY untuk terus berupaya memberikan yang terbaik dalam pelayanan pada masyarakat dan pembangunan DIY. Seiring berbagai tantangan dan hambatan yang muncul, Pemda DIY berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menghadirkan berbagai inovasi baik dalam bentuk kebijakan maupun teknis operasional. Beberapa inovasi tahun 2019 Pemda DIY diantaranya:

ADA KINOSI (AYO DATANG KE KLINIK KONSTRUKSI) **Menangani Problematika Sarana dan Prasarana Masyarakat Dengan Klinik Konstruksi**

Klinik Konstruksi dibentuk sebagai respon terjadinya gempa bumi 27 Mei 2006 dan erupsi merapi tahun 2010. Layanan ini tersedia dalam dua bentuk, yaitu layanan konsultasi tatap muka (*help desk*) di Kantor Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) DIY setiap hari Rabu mulai pukul 10.00–12.00 WIB dan layanan konsultasi melalui situs www.klinikkonstruksi.jogjaprov.go.id. Keunggulan inovasi ini adalah durasi layanan selama 24 jam/7 hari konsultasi melalui secara daring.



KLINIK KONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- NSPM
- HARGA BAHAN BANGUNAN
- DATABASE KONSTRUKSI
- UNDUH
- INFORMASI
- KONSULTASI
- GALERI

Flash News

Beranda / NSPM

Silakan Pilih Kriteria NSPM

UMUM	Cipta Karya	Perumahan Permukiman	Bina Marga	Sumber Daya Air

KONSULTASI TERKINI

- Uji Bahan Organik pada tanah/sedimen
- BIAYA SEWA KENDARAAN RODA 2
- harga bahan bangunan
- Sumber dan Aturan Upah Tukang

Inovasi ini dirancang untuk mencakup berbagai elemen, yaitu: (1) instansi teknis pemerintah pusat/ daerah/ kabupaten & kota (sektor: pembinaan konstruksi, ke-PU-an, perizinan dan penataan ruang); (2) institusi perguruan tinggi (fakultas teknik); (3) asosiasi badan usaha & asosiasi profesi (sektor konstruksi); (4) pihak pengembang kawasan & properti; (5) penyedia jasa kontraktor & konsultan; (6) produsen/ penyedia bahan & alat konstruksi; (7) lembaga pengembangan jasa konstruksi di daerah; (8) unsur komunitas masyarakat pemerhati lingkungan permukiman, serta; (9) para penggiat infrastruktur permukiman.

Klinik Konstruksi DIY bertujuan menjadi pusat rujukan teknis yang mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi konsultasi dan advokasi teknis bidang ke-PU-an. Hal ini demi terwujudnya kawasan lingkungan permukiman yang aman secara konstruksi, adaptif terhadap bencana, nyaman dan mudah diakses. Saat ini, Layanan Klinik Konstruksi telah direplikasi oleh Kementerian PUPR Indonesia dalam bentuk sistem informasi dan aplikasi berbasis android dan web yang dapat diakses di <http://klikon.pu.go.id/>. Hal ini membuktikan bahwa layanan Klinik Konstruksi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memungkinkan untuk direplikasi.

JOGJABELAJAR CLASS

Belajar Tanpa Bayar Bersama

JOGJABELAJAR merupakan layanan strategis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa sebuah portal pembelajaran daring. Inovasi ini dikembangkan guna menunjang pemanfaatan media pembelajaran dalam rangka penyelenggaraan pengembangan, produksi, dan layanan pembelajaran berbasis TIK untuk meningkatkan mutu pendidikan di DIY. JOGJABELAJAR, menjawab kebutuhan para pelajar dalam mempermudah proses belajar dengan konsep tanggap kebutuhan generasi milenial. Layanan JOGJABELAJAR diakses secara online melalui alamat <http://jogjabelajar.org> atau <http://jogjabelajar.jogjaprov.go.id>. Layanan ini memuat antara lain JB Media (berisi konten-konten media pembelajaran interaktif); JB Budaya (berisi digitalisasi konten-konten berbasis budaya jawa gaya Yogyakarta); JB Tube (berisi konten-konten video pembelajaran); JB Radio (layanan radio streaming pendidikan); dan JB Class (layanan kelas maya berbasis kelas/komunitas). Setiap tahunnya, fitur dalam portal Jogjabelajar akan terus dikembangkan menyesuaikan dengan



kebutuhan dan perkembangan teknologi yang ada. Masyarakat dapat mengakses seluruh layanan Jogjabelajar selama 24 jam per hari dan 7 hari dalam seminggu, tanpa batasan ruang dan waktu menggunakan berbagai jenis perangkat, baik komputer, laptop, ataupun gawai (android dan ios).

Salah satu layanan utama dalam portal JOGJABELAJAR adalah *Jogjabelajar Class*. Berbeda dengan kelas maya lain yang ada di Internet dan tengah tren pada saat ini, seluruh fitur dan materi di portal JOGJABELAJAR dapat diakses secara gratis. Di dalam Jogjabelajar Class, guru dapat saling membagikan materi dan media pembelajaran mereka. Dengan saling berbagi dan belajar, para guru bisa meningkatkan kompetensi dan keterampilan pembelajaran mereka. Fitur ini dapat membantu meningkatkan mutu pendidik, baik di desa maupun di kota. Melalui implementasi kelas maya *Jogjabelajar Class* diharapkan dapat membantu pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, khususnya di DIY.

KELAS BISNIS SELASA PAGI *Belajar Bareng Maju Bareng*

Layanan Kelas Bisnis Selasa Pagi (KBSP) adalah inovasi layanan pembinaan usaha mikro kecil menengah melalui kelas reguler yang diselenggarakan setiap hari Selasa di pusat layanan usaha terpadu Dinas Koperasi UKM



DIY. Inovasi ini bertujuan mempercepat pertumbuhan usaha pelaku UMKM melalui pelatihan kewirausahaan yang berkualitas secara tematik, praktis, yang disesuaikan dengan persoalan mendasar yang dihadapi oleh pelaku UMKM. KBSP dilaksanakan dengan pola *hybrid system* (kelas luring dan daring) dan juga dipadukan layanan konsultasi pascakelas.

KBSP dilaksanakan secara tematik yang menjawab lima permasalahan dasar pelaku UMKM yaitu; pemasaran, permodalan, akses pembiayaan, manajemen, dan produksi. Selain itu, keunggulan dan nilai lebih dari program ini adalah materi disajikan secara ringkas dengan pendekatan aspek 3 set yaitu; *mindset*, *skillset*, dan *action set*. *Goals* dari program ini adalah para peserta akan berubah secara *mindset*, bertambah secara *skill*, dan terarah secara aksi. Adapun keunggulan lainnya adalah: kelas



bersifat terbuka bagi pelaku UMKM se DIY; dilaksanakan secara regular luring dan daring; bersifat gratis dan non anggaran; materi bersifat praktis yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar pelaku UMKM; dan pasca kelas, dilakukan konsultasi usaha yang bersifat sistematis dan berkelanjutan.

JOGJA DALAM GENGAMAN

Aplikasi Mobile Portal Jogja Istimewa

APLIKASI MOBILE PORTAL JOGJA ISTIMEWA (JOGIST) merupakan sebuah konsep daerah cerdas dalam genggam (mCity) yang dapat membantu memberikan informasi dengan memperkenalkan pendekatan baru penyampaian pelayanan publik dan informasi potensi budaya dan wisata daerah dalam satu portal aplikasi mobile. Tujuannya, agar program-program pemerintah dapat tercapai dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.



Dengan JOGJA ISTIMEWA, berbagai macam data dan informasi yang berada di setiap sudut kota dapat dikumpulkan, dianalisis dengan aplikasi cerdas, selanjutnya disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui aplikasi yang dapat diakses oleh berbagai jenis gadget. Aplikasi Jogja Istimewa ini menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan wisata, budaya, transportasi, dan even. Saat ini terdapat sepuluh menu utama dengan berbagai fitur yang menarik. Menu tersebut berfungsi sebagai kanal informasi dan interaksi dengan masyarakat, penyediaan berbagai jenis layanan publik, dan jalur untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari masyarakat.

NO ONE POOR LEFT BEHIND

Jaminan Penyangga Bagi Penduduk Miskin/marginal

Satu tahun pasca penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masih ditemukan berbagai permasalahan dalam akses penduduk miskin dan marginal terhadap pelayanan JKN akibat belum terdata, register bermasalah, dalam proses antrian registrasi, non identitas (gelandangan, pengemis dll), anggota PBI tanpa jaminan, korban kekerasan dll. Tahun 2015-2016 inovasi diiniasi untuk menjawab permasalahan tersebut. Konsep yang dibangun adalah berperan sebagai pendamping JKN dengan menutup permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Inovasi ini dimulai dengan



advokasi dan pendekatan kepada sektoral dan lembaga terkait. Selanjutnya disusun komitmen dan ditetapkan dalam regulasi. Jaminan penyangga meliputi 24 jenis jaminan yang diperuntukan bagi penduduk miskin dan marginal dan melibatkan berbagai *stakeholder* dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Hasil evaluasi tahun 2017-2018 menunjukkan Jaminan Penyangga telah mampu memberikan perlindungan kepada 8.000-9.500 penduduk miskin dan kelompok marginal yang belum dapat mengakses JKN. Inovasi *No One Poor Left Behind* telah mendapat apresiasi berbagai instansi vertikal dan telah mulai dicoba diterapkan oleh pemerintah daerah lain.

SEPATU JOLIFA

Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library For All

Untuk mendukung tercapainya visi RPJPD DIY 2005-2025 yaitu DIY menjadi pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara, peran penting perpustakaan diperlukan sebagai sarana belajar, pemenuhan sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Laju perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat menjadi tantangan tersendiri bagi perpustakaan. Sumber informasi yang harus disediakan menjadi semakin banyak dan beragam. Sebuah perpustakaan tidak akan mampu mengumpulkan seluruh konten

pengetahuan untuk penggunaannya. Keterbatasan tersebut dapat diminimalisir dengan membangun layanan perpustakaan terpadu melalui kerjasama antar perpustakaan. Kekuatan koleksi dari masing-masing perpustakaan dapat dihimpun guna memberikan akses informasi yang lebih beragam.

SEPATU JOLIFA adalah solusi cerdas untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan melalui jaringan kerjasama antar perpustakaan berbasis teknologi informasi. Progam ini diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY dan sejumlah perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam sistem perpustakaan terpadu. Saat ini jumlah perpustakaan yang tergabung yaitu sebanyak 39 perpustakaan yang terdiri dari satu



perpustakaan umum daerah, lima perpustakaan umum kabupaten/kota, 28 perpustakaan perguruan tinggi, tiga perpustakaan sekolah, dan dua perpustakaan instansi. SEPATU JOLIFA menawarkan layanan secara online maupun offline. Secara daring Sepatu Jolifa dapat diakses melalui alamat website www.jogjalib.com. Jenis layanan yang disediakan merupakan integrasi informasi 39 perpustakaan yang meliputi data katalog buku, *e-resources*, informasi fasilitas perpustakaan, dan informasi buku unggulan. Secara luring SEPATU JOLIFA memberikan kemudahan akses masuk perpustakaan melalui layanan silang kunjung dan pinjam buku antar perpustakaan melalui layanan silang pinjam. Layanan silang pinjam ini menjadi satu-satunya di Indonesia yang menerapkan konsep *Inter Library Loan* (ILL) di tingkat provinsi.

MENGGAPAI MIMPI SAHABAT RIMBA

Kawasan hutan di DIY terdapat di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo. Sekitar 49.476 kepala keluarga (KK) tinggal di desa-desa sekitar hutan dan 18,34% diantaranya termasuk dalam KK miskin. Berubahnya paradigma pembangunan kehutanan dari *Timber Based Management* menjadi *Social Forestry* turut mempengaruhi pembangunan kehutanan di DIY. Kegiatan pemberdayaan masyarakat direvitalisasi sehingga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar hutan dapat terjalin dengan baik.



Hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat sekitarnya memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan pemanfaatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung, maka sejak tahun 2015 mulai diinisiasi pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di hutan lindung dimana masyarakat merupakan pelaku utamanya. Inisiasi ini selaras dengan visi misi DIY sebagai kota pendidikan, budaya, dan wisata. Wisata alam yang dikembangkan di kawasan hutan lindung maupun hutan produksi diharapkan mampu mengangkat nilai





wisata sekaligus pendidikan dan budaya yang berkaitan erat dengan sejarah DIY.

Inovasi ini dapat membantu para sahabat rimba (masyarakat sekitar hutan) melalui peningkatan kesejahteraan dengan moto :

*Dari hutan kita tingkatkan
pemberdayaan masyarakat
Dari hutan kita lestarikan budaya bangsa
Dari hutan kita cerdaskan anak bangsa
Dari hutan kita lestarikan sumberdaya alam*

Adanya upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui inovasi Menggapai Mimpi Sahabat Rimba ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat membuat mereka sadar bahwa keberadaan hutan sangatlah penting baik dari sisi ekologi, ekonomi, maupun sosial. Sehingga masyarakat yang dulu melakukan perusakan hutan, kini berubah menjadi mencintai dan melestarikan hutan.



Penutup





 **encapaian kinerja** Pemda DIY tahun 2019 yang dihasilkan dari pengukuran dan penilaian kinerja yang semakin berkualitas telah menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019 dapat tercapai. Kinerja yang meningkat dari waktu ke waktu merupakan buah dari upaya perbaikan kinerja yang dilakukan secara konsisten, antara lain melalui penetapan kinerja yang rasional dan terukur dengan perencanaan kinerja yang mendasarkan pada problematika daerah secara berkualitas dan penilaian kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Masih terdapat sasaran pembangunan yang belum tercapai yaitu kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan indeks pembangunan manusia. Kemiskinan dan ketimpangan memang masih menjadi isu utama dalam pembangunan DIY, sekaligus menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Mengingat pelaksanaan pembangunan tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD DIY 2017-2022, Pemda DIY tetap optimis dengan sisa waktu yang ada bahwa target akhir RPJMD dapat dicapai secara terukur meskipun hal tersebut memerlukan langkah yang tidak biasa.

Upaya-upaya perbaikan ke depan dalam menjawab tantangan pembangunan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang dilakukan ke depan antara lain: Pertama, tetap fokus pada program-program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan melalui desain program/kegiatan tematik yang sinergi lintas sektor maupun lintas wilayah serta lintas penganggaran, secara jelas fokus dan lokusnya dengan memprioritaskan kelompok atau wilayah yang timpang. Kedua, meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemda DIY dengan berbagai unsur dalam pembangunan untuk mewujudkan kinerja yang semakin berkualitas. Ketiga, senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengupayakan inovasi-inovasi pelayanan publik.





